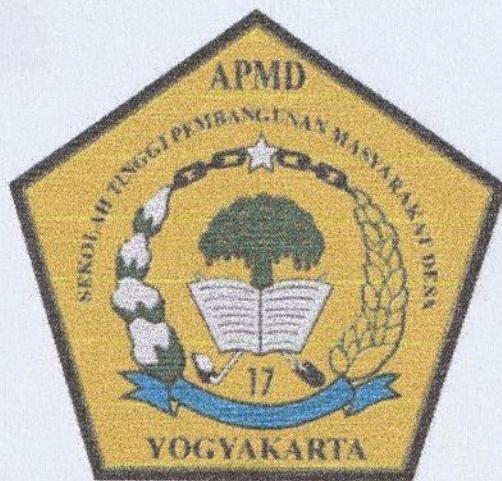


**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA
PANTAI PARANGTRITIS**

*(Studi Kasus di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta)*

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

Monika

22610045

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2024



PENGESAHAN

TESIS

Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis

(Katurahan Parangtritis, Kapanéwon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Oleh

MONIKA

22610045

Disahkan oleh Tim Penguji

Pada tanggal: 16 Agustus 2024

Susunan Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si.

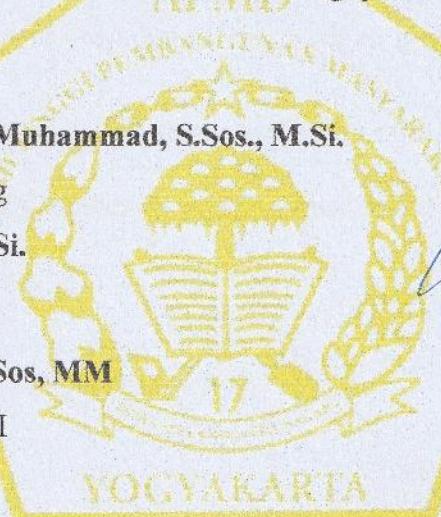
Ketua/Pembimbing

2. Dr. Supardal, M.Si.

Penguji Samping I

3. Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM

Penguji Samping II



Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, M.M.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Monika

NIM : 22610045

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 7 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Monika

MOTTO

Hiduplah dengan Tujuan

(*Live with Purpose*)

“ Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok,
Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri,
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”.

(Matius 6:34)

“ Orang malas tidak akan menagkap buruknya, tetapi orang rajin akan
Memperoleh harta yang berharga”.

(Amsal 12:27)

“ Karyamu akan Menempati Bagian Tersendiri dalam Hidupmu ”

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Yesus Kristus yang telah memberi rahmat, pertolongan dan anugrah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga Saya dapat menulis dan menyelesaikan TESIS ini.

Dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih, karya ilmiah ini Saya ingin mempersembahkan kepada :

1. Yesus Kristus, kerena berkat rahmat kebaikan-nya saya bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
2. Kedua orangtua saya, Bapak Supianus dan Ibu Ernawati , gelar ini saya persembahkan untuk kalian, berkat kalian hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagia. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan moril maupun materi, menjaga saya dalam doa-doa Bapak Dan Ibu, dan yang selalu memberikan dukungan doa, dalam segala proses kehidupan yang saya lalui, termasuk dalam proses pendidikan saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh sukacita.
3. Saudari-saudara saya terkasih, Siska Sriandani, Seselia Randa, Benedikta Bulle, Teresia Pitri, Fransiskus Seno, Peternus Iin, keponakan saya tercinta Bio dan keluarga bersar saya yang tidak bisa disebut satu per satu yang selalu ada dan memberi semangat dan doa.

4. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si yang senantiasa membantu dan penuh kesabaran serta membimbing saya dalam mengerjakan Tesis saya.
5. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang begitu berarti dalam hidup saya kepada Patrick Adtya Pratama Sinom karena telah begitu baik dan simpatik, saya berhasil mengatasi semua tantangan ini hanya karenamu, dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik, kepada Patrick Adtya Pratama Sinom thanks for you .
6. Seorang sahabat yang berhati emas sulit ditemukan, kebaikanmu benar-benar tiada bandingnya,kaliam menjadi salah orang-orang yang layak kupersembahkan bentuk perjuanganku ini saudari Feirerita dan Natalia Eva Tarigas salam hangat buat kalian .
7. Teman seperjuanganku, teman satu kelas yang selalu bersama serta membantu dalam kerumitan menyusun Tesis ini, terima kasih telah menjadi teman sekaligus saudara dan selalu memberikan motivasi, arahan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini tetap untuk terus bertumbuh menjadi yang lebih baik dan terus berusaha menggapai impian. Terima kasih telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan, tak pernah memutuskan menyerah sesuliat apapun menulis Tesis ini dan tetap semangat next chapter.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Yesus Kristus atas Karunia-nya atas segala daya dan upaya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul “ Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis”. Tesis ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih.

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah bapak berikan selama penulis mengenyam Pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.
2. Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM selaku Direktur Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan banyak inspirasi sehingga penulis tergerak untuk melanjutkan pendidikan di Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” ini.
3. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing saya, terima kasih banyak atas kesabaran, bantuan,

nasehat serta ilmu yang tiada batas yang telah bapak berikan kepada saya dalam menyelesaikan Tesis ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Pemerintah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.
5. Terima kasih kepada Sahabat seperjuangan saya, Wawan, Boming, dan Kak Diana.
6. Terima kasih untuk teman-teman APMD dan seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan anggakatan 30.
7. Dinas Pariwisata Bantul dan jajarannya yang telah bersedia menjadi responden dan membantu memberikan data yang diperlukan penulis.
8. Pemerintah Kalurahan Parangtritis yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis
9. Semua pihak yang telah membantu proses perjuangan penyusunan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila ada kesalah maupun hal-hal yang kurang berkenan selama penulisan Tesis ini.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024

Monika

DAFTAR ISI

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA PANTAI PARANTRITIS

PENGESAHAN	i
PERNYATAAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Literature Review.....	7
C. Pokus Penelitian.....	14
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
F. Kerangka Konseptual	16
a. Pemerintahan.....	16
b. Collaborative Government.....	22
c. Pengelolaan	28
d. Pariwisata	30
BAB II METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pemilihan Informasi atau Narasumber	47
F. Teknik Validasi Data.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	60

A. Sejarah Pemerintahan Kalurahan Parangtritis.....	60
B. Kondisi Klimatologi dan Meteologi.....	65
C. Kondisi Demografi.....	67
D. Gambaran Pantai Parangtritis.....	75
a. Aksesibilitas	78
b. Kelembagaan.....	79
c. Amenitas	80
d. Kondisi Pantai Parangtritis.....	81
E. Ekonomi	83
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	87
A. Deskripsi Infomasi	87
B. Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis	91
a. Dialog Tatap Muka	95
b. Membangun Kepercayaan.....	100
c. Komitmen Terhadap Proses	105
d. Saling Memahami	112
e. Hasil Akhir Yang Dicapai	115
C. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis	123
a. Faktor-Faktor Yang Mendukung.....	124
b. Faktor-faktor Yang Menghambat.....	127
D. Pembahasan.....	128
E. Kebaharuan	131
BAB V PENUTUP.....	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	135
C. Keterbatasan Penelitian	137
PANDUAN WAWANCARA.....	147
DAFTAR OBSERVASI	145
DOKUMENTASI	146

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Desa Parangtritis.....	67
Tabel 3.2. Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan	68
Tabel 3.3. Komposisi Menurut Agama	70
Tabel 3.4. Mata Pencaharian Penduduk	71
Tabel 3.5. Jumlah Penggunaan Tanah	74

DAFTAR GAMBAR

Susunan Organisasi Pemerintahan Parangtritis	65
Gambar Pantai Parangkritis.....	77
Gambar Rute Terminal Giwangan Menuju Pantai Parangtritis	79

INTISARI

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mempunyai berbagai bentuk pariwisata menarik yang salah satunya adalah objek wisata Pantai Parangtritis. Collaborative Governance pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pengembangan dan pendayagunaan pariwisata secara optimal mampu meningkatkan kawasan wisata tersebut menjadi lebih baik sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis tidak hanya pemerintah Kabupaten sendiri yang melakukan tetapi pihak-pihak lain juga ikut ambil bagian, yang dibantu masyarakat lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis. Teori yang digunakan ialah teori collaborative governance oleh Ansell dan Gash yaitu ada 5 indikator: Dialog tatap muka, Membangun kepercayaan, Komitmen Terhadap Proses, Saling Memahami dan Hasil Akhir yang Dicapai . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif bersifat analisis deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data Wawancara, Pengamatan, Dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis sudah dilaksanakan secara informal dengan baik.

Hasil penelitian adalah Dialog Tatap Muka sudah dilaksanakan dengan baik, yang mana pihak yang saling terlibat. Membangun Kepercayaan sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak saling percaya satu sama lain berkontribusi dengan keterbukaan informasi. Komitmen Terhadap Proses sudah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masingmasing pihak. Saling Memahami sudah dilaksanakan dengan optimal, dimana hal ini tampak membangun part of them satu sama lain. Hasil Akhir Yang Dicapai telah mendapatkan hasil yang cukup optimal dimana dapat dilihat dari pengelolaan pariwisata pantai parangtritis sudah berjalan dengan baik dan efektif.

Kata Kunci: Collaborative, Governance, Pengelolaan

ABSTRAK

The Special Region of Yogyakarta is one of the areas that has various forms of interesting tourism, one of which is the tourist attraction Parangtritis Beach. Collaborative Governance basically aims to solve certain problems or issues together from related parties. The development and utilization of tourism optimally is able to improve the tourist area for the better so that it becomes an attraction for tourists. In the management of Parangtritis Beach tourism, not only the Regency government itself does it but other parties also take part, which is assisted by the local community and involves the local community in tourism management. This study aims to analyze Collaborative Governance in Parangtritis Beach Tourism Management. The theory used is the collaborative governance theory by Ansell and Gash, which has 5 indicators: Face-to-face dialogue, Building trust, Commitment to the process, Mutual Understanding and the final result achieved. This study uses a type of qualitative research that is descriptive analysis. With data collection techniques of Interview, Observation, Documentation. Based on this study, it can be concluded that Collaborative Governance in Parangtritis Beach Tourism Management has been carried out informally well. The result of the study is that the Face-to-Face Dialogue has been carried out well, where the parties are involved with each other. Building Trust has been carried out effectively in accordance with the belief of each party trusting each other, contributing to information disclosure. The commitment to the process has been implemented in accordance with the responsibilities of each party. Understanding each other has been implemented optimally, where this seems to build part of them with each other. The final results achieved have obtained quite optimal results which can be seen from the management of parangtritis beach tourism has been running well and effectively.

Keywords: Collaborative, Governance, Management

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mempunyai berbagai bentuk pariwisata menarik yang salah satunya adalah objek wisata Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis merupakan sebuah pantai yang berada di pesisir selatan Kota Bantul tepatnya di Kecamatan Kretek. Pantai Parangtritis telah menjadi sebuah icon tujuan bagi masyarakat setempat sebagai tempat pariwisata yang mempunyai daya tarik tersendiri. Pantai Parangtritis merupakan sebuah pantai yang terletak di Kelurahan Parangtritis. Maka dari itu, pantai tersebut dinamai persis dengan nama daerah setempat. Wilayah Pantai Parangtritis juga mencakup beberapa pantai dan wilayah lain yang memanjang dari timur ke barat. Untuk pantai Parangtritis sendiri adalah sebuah pantai yang bisa dikatakan menempati bagian timur. Lalu, geser ke barat lagi ada Pantai Parangkusumo hingga ke Pantai Depok yang menempati wilayah paling barat sendiri dari Kelurahan Parangtritis.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat bergerak sebagai pelaku wisata. Sementara itu pihak swasta berperan sebagai mitra yang membantu dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pariwisata dan juga penggerak yang menggerakkan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, swasta disini juga berperan dalam memberikan bantuan-bantuan pembangunan fisik. Pemerintah setempat

juga bekerja sama dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang berada pada destinasi wisata sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata. Termasuk kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, dan media massa. Kemudian pemerintah juga bekerja sama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam upaya memberikan bantuan.

Collaborative Governance sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi program Pemerintah. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder. Dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil organisasinya walaupun mereka tunduk pada kesepakatan bersama.

Collaborative Governance pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya sebatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan stakeholder maupun masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen

yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi misi norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan kerja sama antar stakeholder atas dasar prinsip bersama untuk mencapai tujuan tertentu termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata yang juga merupakan tugas dari pemerintah.

Pengembangan dan pendayagunaan pariwisata secara optimal mampu meningkatkan kawasan wisata tersebut menjadi lebih baik sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Pengembangan kawasan wisata ini dimaksudkan untuk menambah keindahan dari tempat wisata tanpa harus merusak ekosistem alam yang ada. Pengelolaan dan pemasaran yang baik adalah salah satu cara untuk mengembangkan kawasan wisata supaya dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Sebagian kota-kota besar di Indonesia memanfaatkan dan mengembangkan sektor pariwisata alam sebagai daya tarik dan aset bagi pemasukan daerah. Pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan hal tersebut maka penanganan yang baik sangat diperlukan dalam upaya pengembangan obyek-obyek wisata di Indonesia. Para pelaku pariwisata mulai melakukan tindakan pengembangan dengan penelitian, observasi terhadap obyek-obyek wisata di Indonesia. Langkah

tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan permasalahan yang ada pada setiap objek untuk kemudian mencari solusinya.

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan tercepat di dunia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Yenni Del Rosa, 2019). Pariwisata mampu menjadi pemasukan bagi negara, khususnya bagi pemerintahan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata sebagai instrumen kunci pada pertumbuhan global serta pengembangan dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata merupakan potensi yang dimiliki setiap daerah, baik yang berupa wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap daerah memiliki potensi wisata yang dapat digali, diolah, dikelola serta dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hiburan dan sarana rekreasi. Pariwisata yang dikelola dengan baik juga dapat dijadikan sebagai pendapatan bagi daerah.

Objek Pariwisata Pantai Parangtritis terletak di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul yang terletak diantara 7°58'33" LS sampai dengan 8°2'26"LS dan diantara 110°25'15 BT sampai dengan 110°28'15'. Fenomena potensi pantai Parangtritis adalah salah satu obyek wisata pantai yang paling banyak menyita perhatian wisatawan, tidak hanya sebagai tujuan wisata alamnya saja melainkan juga menjadi tujuan wisata religi dan budaya.

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh manusia untuk menghilangkan rasa stress dan dengan menikmati

pemandangan yang luar biasa disuguhkan objek wisata. Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Kodhyat (1998), pariwisata adalah sebagai perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain. Baik yang dilakukan secara perorangan, kelompok ataupun usaha. Dimana orang yang melakukan perjalanan wisata ini memiliki kepentingan untuk keseimbangan mental, misalnya mengurangi stress, menghibur diri dan refreshing.

Pengembangan pariwisata di Pantai Parangtritis, pemerintah harus melibatkan masyarakat khususnya masyarakat Kalurahan Parangtritis karena kalurahan Parangtritis banyak mengetahui tentang kondisi Pantai Parangtritis dan sekitarnya yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Parangtritis. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga evaluasi sangat menentukan keberlanjutan pengembangan pariwisata di Pantai Parangtritis. Masyarakat juga menentukan kesejahteraan serta peningkatan mutu hidup yang bisa dinikmati oleh masyarakat serta perolehan manfaat ekonomi yang bisa diterima oleh pemerintah.

Pariwisata memiliki sifat yang kompleks oleh karena itu dalam mengelolah pariwisata perlu adanya kerjasama antara swasta, pemerintah maupun masyarakat agar pariwisata dapat berkembang secara baik, benar

dan memberikan manfaat bagi manusia. Pembangunan pariwisata mampu menarik aktivitas bisnis untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi suatu negara. Ketika pariwisata direncanakan dengan baik, mestinya akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada sebuah destinasi. Muncul dan berkembangnya kegiatan pada pariwisata tidak lain karena di wilayah tersebut terdapat objek yang spesifik dan unik sehingga memiliki daya tarik yang tidak ada di tempat lain sehingga menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Sebagaimana diketahui bahwa wisata mempunyai hakekat keunikan, kekhasan, perbedaan, orisinalitas, keanekaragaman, dan 3 kelokalan sehingga menarik banyak orang untuk melakukan perjalanan wisata.(zaenuri; 2016).

Dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis tidak hanya pemerintah kabupaten sendiri yang melakukan tetapi pihak-pihak lain juga ikut ambil bagian, yang dibantu masyarakat lokal dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan pariwisata. Pariwisata pada dasarnya merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok mengunjungi suatu tempat untuk rekreasi dimana terjadi interaksi sosial antara wisatawan dengan penduduk yang dapat memungkinkan timbulnya permasalahan atau konflik, pengelolaan pemerintah dan masyarakat, perbedaan prioritas dan tujuan ini adalah beberapa contoh konflik di lapangan. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan yang terjadi antara wisatawan dengan penduduk maka diperlukannya instrumen dari pemerintah setempat yang

bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan maka fungsi penertiban ini sangatlah penting.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa perlu adanya peran aktif dari pemerintah dan non-pemerintah dalam melakukan kolaborasi agar pariwisata dapat dikelola dengan baik. Karena didalam *collaborative governance* pemerintah dan non-pemerintah aktif berpartisipasi. Sehingga pariwisata dapat berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, pengelolaan pariwisata memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Terdapat beberapa permasalahan terkait keterlibatan antar pihak dalam pengembangan pariwisata, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antar berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan wisata dapat menjadi salah satu program untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, pengembangan pengelolaan wisata juga berdampak pada perekonomian dan jasa pariwisata sekitar. Oleh karena itu, collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata sangat penting untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui collaborative governance dalam pengelolaan wisata pantai Parangtritis di kecamatan kretek.

B. Literature Review

Untuk menghindari duplikasi penelitian yang sudah dilakukan, serta sebagai perbandingan maka perlu dikemukakan gambaran hasil penelitian

yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tema proposal yakni :

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis, maka penulis mencoba untuk mencari gap di antara peneliti yang telah ada, dan untuk menambah referensi penulisan proposal ini, diantaranya :

1. Andi Hariadi (2019), Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba, Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika proses pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira Kabupaten Bulukumba dalam a) pergerakan prinsip bersama pengungkapan sudah cukup baik karena melibatkan pihak lain namun dalam deliberasi belum berjalan dengan baik karena jarang melakukan diskusi. b) motivasi bersama kepercayaan belum baik karena dalam dimensi kepercayaan bersama pemahaman, dan komitmen walaupun legitimasi internal sudah jelas. c) kapasitas melakukan tindakan bersama dalam pengelolaan pariwisata pantai pasir putih bira kabupaten bulukumba sudah baik dari dimensi prosedur dn kesepakatan bersama namun belum baik dalam dimensi kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya.
2. Aziz Ar Rasyid dan Adianto (2021) , Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Kualitatif , hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wisata Toluk Jangkang merupakan wisata yang memiliki konsep berwisata memadukan diam dengan budaya lokal. Konsep Collaborative

Governance sangatlah berperan penting karena dalam penerapannya tidak hanya melibatkan antara pemerintah dan non pemerintah saja melainkan pihak-pihak lain.

3. Zahratun Aeni dan Retno Sunu Astuti (2019), Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati). Kualitatif, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah dan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki sinergisitas dalam merumuskan perencanaan strategi dalam pengembangan pariwisata yang ada di daerah.
4. Meika Permata Sari, Collaborative Governance dalam pengembangan Objek Wisata Horti Park Lampung di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan objek wisata Horti Park Lampung dapat dikategorikan sebagai praktek Collaborative Governance dan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan objek wisata edukasi. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan objek wisata Horti Park Lampung dikategorikan sebagai praktek Collaborative Governance mengacu pada model Collaborative

Governance Ansel & Gash yaitu kondisi awal menggambarkan ketidakseimbangan sumber daya dan minimnya insentif; desain kelembagaan posisi teratas Pihak Pengelola Horti Park Lampung memiliki kedudukan yang sama dengan ITERA, anggota kolaborasi Kepala Kebun, PT. Primasid Andalan Utama, PT. Ewindo, dukungan masyarakat Horti Park Lampung; kepemimpinan menjalankan aturan berdasarkan SOP; proses kolaborasi tahap face to face masih dilakukan pihak terlibat, adanya kepercayaan pihak yang terlibat dan merasa yakin dengan keberadaan kolaborasi, dibutuhkan komitmen memperkuat kolaborasi dengan MOU, mengedepankan pemahaman bersama, hasil akhir kolaborasi terjalin sudah baik walaupun masih terdapat hambatan.

5. Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq, Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo), Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses Collaborative Governance terkait pengembangan Kawasan minapolitan di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No.520/1395/201.1/ 2012 tentang Penetapan Kabupaten Sidoarjo sebagai pusat kawasan minapolitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan Kawasan Minapolitan sudah cukup baik. Hal ini dikarenakan kolaborasi sudah

melalui penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan pembentukan kapasitas bersama. Setelah tiga hal itu terbentuk dilanjutkan dengan melaksanakan tindakan kolaborasi yang memberikan dampak sementara. Sedangkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kolaborasi antara lain : kesulitan dalam membentuk kelompok usaha menjadi berbadan hukum, kontinuitas kolaborasi yang masih kurang, pemerintah hanya memfasilitasi peningkatan produktivitas tanpa memberikan alternatif pemasaran, dan pihak swasta kurang diikutsertakan dalam seluruh kegiatan kolaborasi.

6. Bernhard Fabian Bichler dan Magdalena Lösch, Tata Kelola Kolaboratif dalam Pariwisata: Wawasan Empiris ke Destinasi Berorientasi Masyarakat Tata kelola menawarkan pedoman berharga untuk mengarahkan dan mengarahkan tujuan. Penelitian tata kelola pariwisata baru-baru ini telah mengeksplorasi peran berbagai aktor dalam mengatur destinasi tetapi belum secara komprehensif menyelidiki proses tata kelola kolaboratif (CG) yang mendasarinya seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, pemahaman bersama, atau faktor pendukung seperti pengaturan kelembagaan atau kepemimpinan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menentukan pendorong dan hambatan CG di tujuan berorientasi masyarakat di Tyrol Selatan (Italia). Hal ini bertujuan untuk mengungkap proses yang mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan. Untuk alasan ini, makalah ini dibangun di atas studi kasus kualitatif dengan 20 wawancara semi-terstruktur dengan

informan kunci. Hasilnya menyoroti bahwa kepemimpinan destinasi adalah pendorong penting CG. Namun, beberapa hambatan untuk CG muncul. Pertama, temuan menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan menyebabkan kurangnya kepercayaan dan meningkatnya rasa tidak aman. Kedua, masuknya aktor penting seperti penduduk dalam tahap pengambilan keputusan dan implementasi langka. Ketiga, temuan kami menyoroti bahwa pemahaman bersama tentang arah pembangunan masa depan hilang di antara para pemangku kepentingan. Kontribusi makalah ini adalah penilaian CG yang disempurnakan dalam pariwisata dengan perhatian khusus pada peran kepemimpinan dan pengaturan kelembagaan. Implikasi yang diturunkan menargetkan peran kepemimpinan untuk mendorong pengembangan pemahaman bersama dan untuk memulai proses pembelajaran kolaboratif yang memberikan hasil yang terlihat dan nyata di masa-masa yang penuh gejolak.

7. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Wisata Parangtritis, Kabupaten Bantul, Meitolo Hulu, M.Baiquni, Chafid Fandeli, Niken Wirasanti. Kawasan wisata Parangtritis adalah tujuan wisata terkenal di selatan Yogyakarta. Kawasan wisata yang terdiri dari beragam objek wisata seperti pantai, gundukan pasir, kuliner, wisata religi dan budaya ini berdampak positif terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan di kawasan wisata Parangtritis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji partisipasi masyarakat lokal dalam kontribusinya terhadap pengembangan kawasan pariwisata

berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan masyarakat setempat yang terlibat dalam industri jasa, kelompok seni budaya dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Hasil penelitian adalah (1) masyarakat setempat telah berkontribusi dalam pengembangan kawasan wisata Parangtritis melalui kegiatan budaya lokal, tempat wisata dan penyediaan fasilitas mengenai kebutuhan pengunjung. (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki beberapa program terkait pemberdayaan di masing-masing lembaga pemerintah yaitu industri jasa tambahan, kelompok lokal pariwisata dan pembangunan sarana dan prasarana. Namun kontribusi masyarakat lokal belum menjadi daya tarik wisata dan berkelanjutan. Program pemberdayaan dari pemerintah daerah belum spesifik untuk pelatihan terkait jasa dan kegiatan usaha yang cocok untuk kegiatan pariwisata di kawasan wisata Parangtritis.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian, metode penelitian, jumlah responden, dan teori yang digunakan. Dan persamaannya terletak pada fokus penelitian dimana sama-sama meneliti di bidang potensi wisata. Dapat di tarik kesimpulan bahwa letak persamaan dari ketujuh penelitian tersebut dengan penelitian saat ini adalah kesamaan dalam mengkaji Collaborative Governance pada suatu program dan pengembangan kegiatan dan ketujuh penelitian tersebut

menggunakan tipe penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan ketujuh penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak hanya membahas tentang proses kolaborasi saja namun juga membahas tentang dampak sementara, dampak yang tidak diinginkan, dan dampak tidak terduga pada tindakan kolaborasi.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata pantai parangtritis yaitu :

Bagaimana *Process Collaborative Governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai parangtritis dengan menggunakan konsep Ansel dan Gash dimana terdapat 5 indikator :

- a. Dialog tatap muka,
- b. Membangun kepercayaan,
- c. Komitmen terhadap proses,
- d. Saling memahami,
- e. Hasil akhir yang dicapai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis, maka rumusan masalah sebagai berikut: “bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul” .

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian penting dalam setiap penelitian, karena memberikan arah dan fokus yang jelas. Berikut adalah beberapa tujuan penelitian dari penelitian ini :

1. Untuk mendeskripsikan proses collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis,
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: manfaat akademis dan manfaat praksis. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, serta sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan khususnya di bidang Pemerintah Desa. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan. Menambah wawasan mengenai studi Collaborative Governance dalam pengelolaan pariwisata

2. Secara Praksis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapakan sebagai bahan masukan Pemerintah khususnya Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan kesadaran warga tentang pengelolaan pariwisata yang baik.

b. Masyarakat

Diharapkan masyarakat semakin memahami atas peran dan tanggungjawab dalam pemanfaatan objek pariwisata dan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan pariwisata dan hasil-hasilnya yang telah dicapai, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kebijakan lebih lanjut.

c. Swasta

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peran sektor swasta agar lebih aktif dalam mendukung peningkatan sarana pengelolaan pariwisata, dan dapat dijadikan salah satu referensi dalam meningkatkan sarana pengelolaan dan pelayanan yang ideal.

F. Kerangka Konseptual

a. Pemerintahan

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat

Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif.

Menurut Undang-Undang 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie. 2011;5).

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara (Munaf. 2016;47).

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Sebagai contoh: Republik, Monarki/Kerajaan, Persemakmuran (Commonwealth). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti: Monarki Konstitusional, Demokrasi, dan Monarki Absolut/Mutlak.

Dalam konteks pengelolaan pariwisata, konsep pemerintahan yang baik, benar, dan jelas mencakup sejumlah prinsip yang dirancang untuk

memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan manfaat positif bagi masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa prinsip tersebut:

1. Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat (*Community Involvement*), pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pariwisata harus melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat harus memiliki suara dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kebijakan pariwisata untuk memastikan bahwa keuntungan dari industri pariwisata tercermin secara adil dalam komunitas.

2. Konservasi Alam dan Budaya

konservasi alam dan budaya (*Conservation of Nature and Culture*) Pemerintahan yang baik harus memprioritaskan konservasi alam dan budaya. Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan alam, melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta mempromosikan pelestarian warisan budaya dan nilai-nilai lokal.

3. Pengembangan Berkelanjutan

Pengembangan berkelanjutan (*Sustainable Development*) pemerintahan harus menerapkan pendekatan pengembangan berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Ini mencakup memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata berkontribusi pada

kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat tanpa merusak lingkungan atau budaya.

4. Keterbukaan dan Transparansi

Keterbukaan dan transparansi (*Openness and Transparency*), pemerintahan yang baik dalam pariwisata harus transparan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Informasi tentang kebijakan, perencanaan, dan dampak pariwisata harus mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan Ekonomi Lokal (*Local Economic Empowerment*), pemerintahan yang baik harus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pariwisata. Ini dapat mencakup pelibatan pelaku usaha lokal, pelatihan keterampilan bagi masyarakat setempat, dan penciptaan peluang pekerjaan yang berkelanjutan.

6. Pengelolaan Dampak Sosial

Pengelolaan dampak sosial (*Management of Social Impacts*), pemerintahan yang baik harus memantau dan mengelola dampak sosial pariwisata. Ini mencakup aspek-aspek seperti dampak terhadap keamanan masyarakat, struktur sosial, dan gaya hidup lokal.

7. Infrastruktur dan Fasilitas yang Memadai

Infrastruktur dan fasilitas yang memadai (*Adequate Infrastructure and Facilities*), pemerintahan yang baik harus memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata memadai untuk menyediakan pengalaman yang aman dan nyaman bagi wisatawan, sambil juga memperhatikan kebutuhan lokal.

8. Pemasaran dan Promosi yang Bertanggung Jawab

Pemasaran dan Promosi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Marketing and Promotion*), pemerintahan harus memastikan pemasaran dan promosi pariwisata dilakukan secara bertanggung jawab, menghindari stereotip atau eksplorasi, dan menekankan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan.

9. Pengawasan dan Kepatuhan

Pengawasan dan kepatuhan (*Monitoring and Compliance*), pemerintahan yang baik harus memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi dampak pariwisata serta memastikan bahwa kebijakan dan regulasi diikuti dan diterapkan secara konsisten.

10. Edukasi dan Kesadaran

Edukasi dan Kesadaran (*Education and Awareness*), pemerintahan harus terlibat dalam upaya edukasi dan peningkatan kesadaran, baik kepada wisatawan maupun masyarakat setempat, tentang praktik pariwisata yang

bertanggung jawab dan pentingnya menjaga lingkungan dan budaya.

Penerapan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak terlibat.

b. Collaborative Government

Collaborative menurut Ansell dan Gash (Sudarmo, 2009: 123) mengemukakan pengertian kolaborasi secara umum dapat dibedakan ke dalam dua pengertian, antara lain:

- a. Kolaborasi dalam arti proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi, pemerintah maupun non pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingannya dan tujuannya.
- b. Kolaborasi dalam arti normatif merupakan aspirasi atau tujuan filosofis bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para partner atau mitranya.

Dalam penelitian ini, kolaborasi yang dimaksud adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Dimana nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama,

kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.

Ansell dan Gash mengistilahkan collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008).

Salah satu definisi dominan dalam literatur adalah dari Ansell dan Gash (2008) bahwa collaborative governance merupakan “Pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah Muhammad Noor - Falih Suaedi - Antun Mardiyanta 43 dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik”. Dengan kata lain, collaborative governance adalah pengaturan formal di mana para pemangku kepentingan berkomunikasi satu sama lain dalam proses musyawarah dan multilateral. Para pemangku kepentingan berbagi tanggung jawab atas hasil kebijakan karena mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan formal dalam forum lembaga pemerintah (Ansell dan Gash 2008).

Ansell dan Gash menilai bahwa collaborative governance merupakan telah dari sudut pandang keilmuan dalam kebijakan publik yang lebih mengarah kepada kolaborasi antar pihak atau aktor. Dalam hal lain Ansell dan Gash juga membuat peta atau indikator-indikator untuk menentukan proses kekolaborasi seperti adanya dialog tatap muka, menciptakan kepercayaan aktor, menekankan kepada komitmen bersama, dan membangun sebuah pemahaman bersama (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative (kolaboratif) yang berarti bekerja sama atau collaboration yang berarti kerja sama. Dalam pengertian yang lebih luas Frans & Bursuck (Afdal 2015) mendefinisikan kolaboratif sebagai gaya atau cara yang dipilih oleh para profesional untuk pencapaian tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang terlibat didalam kegiatan kolaboratif memiliki tujuan yang sama, tidak boleh berbeda, sehingga membutuhkan adanya mekanisme perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut secara bersama sehingga tujuan akan dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat Idol & Baran (Afdal 2015) yang menyatakan bahwa in collaborative, planning and implementing are joint effort. Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan kolaboratif yang efektif kegiatan perencanaan dan pelaksanaan merupakan usaha bersama.

Sebagian besar pemerintah telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Akan tetapi kerjasama yang dibangun hanya sebatas

konvensional, yaitu sebatas pada kerjasama antara pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dan lembaga swasta sebagai kontraktor. Kerjasama ini tidak lebih dari transaksi jual beli barang dan jasa antara pemerintah dan pihak swasta. Kerjasama yang bersifat jangka pendek dengan intensitas hubungan yang terbatas, sebagaimana diatur dalam kontak. Kemanfaatan kerjasama dihitung sebagai kompensasi atau prestasi dan resiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Kalau dilihat dari pola kerjasama tersebut kelihatannya sudah ada kemitraan antara pemerintah dan non-pemerintah namun kenyataannya belum ada.

Seharusnya pemerintah lebih memahami kerjasama sebagai kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, masing-masing dari pihak berusaha melakukan inisiasi, penyamaan visi, penyatuan tujuan, strategi dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Meskipun begitu masing- masing pihak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan secara independen. Hubungan yang dibangun dengan masyarakat bersifat kolaboratif, hubungan prinsipal agen tidak akan berlaku karena kerjasama yang terjadi adalah kerjasama antara prinsipal dengan prinsipal (Dwiyanto, 2010).

Para pihak yang berkolaborasi adalah prinsipal sekaligus bertindak sebagai agen untuk mereka sendiri. Kemitraan melibatkan dua pihak untuk saling berbagi sumberdaya, resiko, tanggung jawab dan manfaat. Sifat kerjasama seperti ini membuat kemitraan berorientasi pada

kepentingan jangka panjang karena merupakan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua pihak (Dwiyanto, 2010).

Model collaborative governance menurut Ansell & Gash (2007:550-561 dalam Putri Azhura , Adji Suradji Muhammad ,Yudhanto Satyagraha Adiputra, 2022 : 3) terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Collaborative, atau kolaboratif, merujuk pada kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk bisnis, teknologi, seni, pendidikan, dan tata kelola, seperti pengelolaan pariwisata yang telah dibahas sebelumnya. Berikut adalah pengertian dan konsep utama dari kerjasama kolaboratif :

Pengertian Kolaboratif:

- a. Kejasama ,Collaborative berasal dari kata "collaborate," yang berarti bekerja sama atau berkolaborasi. Ini mencakup partisipasi aktif dan kontribusi dari semua pihak yang terlibat.
- b. Komunikasi Terbuka, melibatkan komunikasi terbuka dan efektif di antara semua pihak yang terlibat, memungkinkan pertukaran ide, informasi, dan pemahaman yang lebih baik.
- c. Tujuan Bersama, fokus pada pencapaian tujuan bersama atau hasil yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Konsep Kolaboratif :

- a. Partisipasi Aktif, melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, sehingga semua suara didengar dan dihargai.
- b. Koordinasi, menekankan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Kepercayaan, membangun dan memelihara kepercayaan antara semua pihak yang terlibat adalah kunci dalam kolaborasi. Kepercayaan memfasilitasi kerjasama yang efektif.
- d. Pembagian Manfaat, menyertakan pembagian manfaat yang adil dan seimbang di antara semua pihak yang terlibat. Pengelolaan Konflik, menangani konflik dengan konstruktif dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak.
- e. Kebijakan dan Prosedur Bersama, pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur bersama yang mendukung kerjasama.
- f. Teknologi dan Sistem Informasi, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem kolaboratif untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang berkolaborasi.

Kolaborasi tidak hanya mencakup interaksi antarindividu, tetapi juga dapat mencakup interaksi antarorganisasi, baik dalam skala kecil maupun besar. Prinsip-prinsip kolaboratif ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks untuk meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan pencapaian tujuan bersama.

c. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata Management berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, mengelola dan mengendalikan. Namun kata Management sendiri sudah diserap kedalam bahasa indonesia menjadi manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan” yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien”

Pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola. Artinya melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, serta mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola. Berikut beberapa definisi dan aspek penting dari pengelolaan:

- a. Proses mengelola, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penggunaan sumber daya organisasi dan kepemimpinan yang efektif untuk mencapai tujuan bersama.

- b. Fungsi pengelolaan, fungsi pengelolaan meliputi beberapa aspek penting, seperti: Perencanaan (Planning) menentukan strategi, target, dan standar kerja. Pengorganisasian (Organizing) mengatur struktur dan fungsi organisasi. Pengarahan (Actuating) menggerakkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Pengawasan (Controlling), mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa tujuan dan standar kerja tercapai.
- c. Pengelolaan sebagai seni dan ilmu, pengelolaan juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Pengelolaan dalam konteks khusus, dalam konteks khusus, seperti pariwisata, pengelolaan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pariwisata yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, pengelolaan adalah proses yang kompleks yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

d. Pariwisata

Salah satu kebutuhan manusia untuk menghilangkan rasa lelah, jemuhan bahkan stres yang diakibatkan oleh kesibukan dan padatnya waktu kerja adalah refreshing. Tujuan dari refreshing adalah untuk mengalihkan perhatian dari suasana rutin ke suasana lain sehingga terjadi penyegaran suasana yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kerja secara optimal. Adapun salah satu usaha manusia dalam mengatasi hal tersebut dengan berwisata. Dalam UU No 10 Tahun 1990 dinyatakan bahwa “pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pemasaran objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berkaitan dengan bidang tersebut”.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Cox (dalam I Gde dan Diarta, 2009), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan; (2) Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata; (3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal; (4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan

budaya dan lingkungan lokal; (5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengelolaan pariwisata mencakup serangkaian kegiatan dan strategi yang dirancang untuk mengembangkan, mempromosikan, dan mempertahankan destinasi wisata agar dapat memberikan pengalaman yang positif bagi wisatawan, serta manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi komunitas lokal. Pengelolaan pariwisata yang baik memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan wisatawan itu sendiri.

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha(diperjelas) objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut. Konsep dasar pariwisata meliputi elemen terkait wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan sebagainya yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata.

Pariwisata adalah fenomena sosial, ekonomi, dan budaya yang melibatkan pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan rekreasi, liburan, atau kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki daya tarik tertentu. Istilah ini mencakup segala bentuk perjalanan dan kegiatan

yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dikenal sebagai wisatawan atau pengunjung.

Beberapa unsur pengertian pariwisata meliputi:

- a. Pergerakan, pariwisata melibatkan pergerakan atau perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ini dapat mencakup perjalanan lokal, nasional, atau internasional.
- b. Tujuan Wisata, wisatawan melakukan perjalanan dengan tujuan tertentu, seperti untuk rekreasi, bersantai, mengeksplorasi keindahan alam, memahami kebudayaan, atau berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.
- c. Aktivitas Rekreasi, pariwisata seringkali terkait dengan aktivitas rekreasi atau hiburan, yang dapat mencakup berbagai hal mulai dari kunjungan ke objek wisata, mengikuti acara budaya, hingga berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
- d. Ekonomi, industri pariwisata memiliki dampak ekonomi yang signifikan, mencakup penciptaan lapangan kerja, pendapatan bagi komunitas setempat, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
- e. Daya tarik pariwisata, pariwisata terkait dengan adanya daya tarik tertentu di suatu tempat yang menarik pengunjung. Ini bisa berupa keindahan alam, warisan budaya, acara-acara khusus, atau fasilitas rekreasi.

- f. Infrastruktur pariwisata, untuk mendukung kegiatan pariwisata, suatu daerah biasanya memerlukan infrastruktur seperti akomodasi, restoran, transportasi, dan fasilitas lainnya.
- g. Interaksi antarbudaya, pariwisata memberikan kesempatan untuk interaksi antarbudaya, di mana wisatawan dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal dan memahami lebih lanjut tentang kehidupan dan budaya mereka.
- h. Pengelolaan Pariwisata, untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat positif, diperlukan pengelolaan pariwisata yang baik. Ini termasuk perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pariwisata dapat memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada bagaimana pengelolaannya dilakukan. Oleh karena itu, praktik pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab semakin menjadi perhatian untuk menjaga keberlanjutan sumber daya dan meminimalkan dampak negatifnya.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan pariwisata. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengijinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu penelitian dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan hipotesis (Moleong,2010:9) artinya adalah penelitian deskripsikan hanya berusaha mengungkapkan suatu fakta-fakta atau permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian tanpa adanya hipotesis terlebih dahulu.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia. Penelitian ini lebih memperhatikan mengenai kualitas, karakteristik, dan keterkaitan antar kegiatan. Jenis penelitian ini menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti.

Karakteristik penelitian deskriptif kualitatif; *Tujuan*, mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena atau kenyataan sosial secara utuh dan komprehensif. *Data*, data diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan hubungan. *Analisis*, analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, dengan fokus pada makna dan interpretasi data daripada generalisasi. *Perspektif*, penelitian kualitatif lebih memperhatikan perspektif subjek dan menggunakan analisis yang bersifat subjektif dan holistik. *Teknik Pengumpulan Data*, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta triangulasi data untuk meningkatkan reliabilitas.

Penelitian deskriptif kualitatif sangat berguna dalam menggambarkan realitas sosial dan fenomena di masyarakat, serta dalam meneliti status kelompok manusia, subjek, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih menekankan analisis atau deskripsi. Dalam penelitian kualitatif, perspektif subjek lebih diutamakan dan peneliti menggunakan landasan teori untuk mengarahkan proses penelitian ke situasi nyata di lapangan.

Beberapa ciri penelitian kualitatif termasuk, Hipotesis; Penelitian kualitatif memiliki hipotesis penelitian yang disampaikan oleh peneliti dalam bentuk kalimat daripada simbol matematika. Objektif Penelitian: Objek penelitian dalam penelitian kualitatif diambil dari lingkungan alami atau natural. Artinya, subjek penelitian tidak dapat diubah atau diada-

adakan. Instrumen Penelitian: Peneliti adalah alat utama yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Metode Penelitian: Metode penelitian kualitatif biasanya lebih fokus pada analisis dan presentasi data melalui penulisan kata deskriptif daripada angka.

B. Lokasi Penelitian

Pantai Parangtritis adalah tempat wisata yang terletak di Kalurahan Parangtritis, Kapanéwon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jaraknya kurang lebih 27 km dari pusat kota. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Yogyakarta dan telah menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung dari proses pengumpulan data di lapangan oleh para peneliti. Ini adalah data asli yang dikumpulkan secara pribadi oleh peneliti sebagai sarana untuk memecahkan masalah penelitian. Metode pengumpulan data primer termasuk observasi, wawancara, survei, dan pengisian kuesioner.

Adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga informan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, komunitas lokal, industri pariwisata, organisasi non-pemerintah, pengunjung destinasi pariwisata, dan masyarakat lokal. Dukumen yang

dibutuhkan berupa dokumen pengelolaan pariwisata, laporan survei pengunjung, laporan statistik pengunjung.

Adapun karakteristik data primer antara lain : Asli, data primer berasal dari sumber pertama dan tidak melalui media perantara. Mentah, data primer belum diolah dan perlu diolah kembali. Dikumpulkan langsung, data primer dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan survei. Valid dan terkini, data primer cenderung valid dan terkini karena diperoleh secara langsung dari sumbernya.

Fungsi data primer, dasar jawaban rumusan masalah, data primer digunakan sebagai dasar jawaban untuk rumusan masalah penelitian. Sumber evaluasi, data primer digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menanggapi suatu permasalahan. Dasar penelitian, data primer digunakan sebagai dasar penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Mendapatkan data yang valid, data primer membantu peneliti dalam mendapatkan data yang valid dan terkini dari objek penelitiannya secara langsung. Informan dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah Dinas Pariwisata Bantul, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Masyarakat dan Swasta.

Contoh data primer dalam penelitian kualitatif adalah hasil observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan subjek penelitian. Dengan demikian, data primer adalah data yang sangat penting dan berguna

dalam penelitian karena memberikan informasi yang asli, valid, dan terkini dari sumber pertama.

b. Data Sekunder

Data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara disebut data sekunder. Data sekunder berbeda dengan data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, seperti buku teks, laporan keuangan, data sensus, data publikasi, data arsip, dan data internet.

Data sekunder adalah data yang didapatkan penulis dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek keberhasilan pemerintah dalam mengelola pariwisata pantai parangtritis.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder ini dapat berupa hasil penelitian sebelumnya, laporan keuangan, buku teks, data sensus, data publikasi, data arsip, atau data yang dikumpulkan oleh organisasi atau individu lain. Data sekunder sering digunakan dalam penelitian karena lebih mudah diakses dan lebih murah dibandingkan dengan data primer, tetapi memiliki beberapa keterbatasan seperti tidak selalu akurat dan tidak selalu sesuai dengan tujuan penelitian.

Karakteristik data sekunder: diperoleh tidak langsung, data sekunder diperoleh melalui perantara, seperti melalui orang lain atau lewat

dokumen. Sudah diolah, data sekunder telah diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih rapi dan lengkap, seperti tabel, diagram, atau grafik. Berasal dari sumber lain, data sekunder berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti penelitian sebelumnya, laporan keuangan, atau data publikasi. Digunakan untuk melengkapi, data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dan membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Data sekunder sangat berguna dalam penelitian karena dapat membantu dalam menghemat biaya dan waktu, serta memberikan informasi yang lebih luas dan lebih akurat. Namun, peneliti harus mempertimbangkan keterbatasan data sekunder dan memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif wawancara adalah bagian terpenting dalam proses pengambilan data karena berhadapan langsung dengan jawaban atas masalah yang hendak kita teliti. Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2017: 144) dengan menggunakan wawancara maka

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih jelas lagi peneliti bisa menggunakan wawancara sebagai langkah pencarian data agar dapat mengetahui hal-hal yang lebih jelas lagi peneliti bisa menggunakan wawancara sebagai langkah pencarian data agar dapat mengetahui situasi yang terjadi di lokasi penelitian.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat, mendalam, dan objektif tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber. Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian di Pantai Parangtritis. Wawancara Dinas Pariwisata Bantul Bapak Setia Ardana 31 Mei 2024, wawancara Lurah Parangtritis Bapak Topo 11 Juni 2024, wawancara Redribus Pantai Parangtritis Bapak Rohmat 11 Juli 2024, wawancara Ketua Kelompok Sadar Wisata 8 Maret 2024, wawancara Masyarakat 8 Maret 2024.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan wawancara:

1. Menentukan tujuan dan jenis wawancara: menentukan tujuan wawancara dan jenis wawancara yang sesuai dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau media online.
2. Menentukan informan dan cara menghubungi: Pembukaan: Awalilah dengan pembicaraan ringan, seperti menanyakan kabar dan kondisi narasumber. Tunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat.
3. Tahap Inti: Ajukan pertanyaan secara urut, singkat, dan jelas. Lakukan perekaman selain pencatatan, hindari pertanyaan yang memojokkan atau menginterogasi.
4. Penutup: Akhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan narasumber diwawancarai.
5. Melaporkan hasil wawancara: Hasil wawancara dituliskan sebagai bentuk laporan. Perhatikan kaidah penulisan laporan, jangan mencampuri hasil wawancara dengan pendapat sendiri, dan pilih data yang relevan dengan permasalahan.
6. Analisis Data Wawancara: Transkripsi: Menuliskan rekaman suara atau video menjadi teks tertulis. Koding: Memberikan label atau kategori kepada teks transkrip berdasarkan tema, konsep, atau pola yang muncul. Reduksi: Menyederhanakan dan menyusun data koding menjadi bentuk yang lebih ringkas dan

terstruktur. Interpretasi: Memberikan makna dan penjelasan kepada data yang telah direduksi. Triangulasi: Membandingkan dan menguji validitas data wawancara dengan data lain yang berasal dari sumber atau metode yang berbeda.

Dengan demikian, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang efektif dalam mendapatkan informasi yang valid dan reliabel dari narasumber, serta memungkinkan peneliti untuk memperoleh jawaban langsung dan memahami perilaku nonverbal responden.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang mendalam dengan langsung bertatap muka antara si pemberi pertanyaan dan si pemberi informasi dengan menggunakan panduan yang sudah ada dan dalam prosesnya peneliti lebih banyak mendengarkan si pemberi informasi tanpa terlalu terpaku pada pedoman wawancara. Untuk menunjang proses penelitian maka peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu: Dinas Pariwisata Bantul, Pemerintah Kalurahan Parangtritis, Pengelola Pariwisata Pantai Parangtritis, dan Masyarakat.

b. Pengamatan

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiyono (2017:108), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang

diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Dalam penelitian, pengamatan adalah tindakan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan untuk merasakan dan kemudian memahami informasi dari sebuah fenomena menggunakan pengetahuan dan konsep yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Peneliti melaksanakan pengamatan di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, sejak 10 Desember 2023, tema pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah seputar pengelolaan pariwisata di Pantai Parangtritis. Pengamatan di mulai dari Dinas Pariwisata Batul sejak 10 Desember 2024, pengamatan Redribusi Pantai Parangtritis sejak 31 Mei 2024, dan pengamatan di Kalurahan Parangtritis dan di lanjutkan pengamatan di objek Pariwisata Pantai Parangtritis sejak 11 Juli 2024, pengamatan selesai 10 Juni 2024.

Teknik pengumpulan data pengamatan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Berikut adalah karakteristik, langkah-langkah, kelebihan pengamatan dan kekurangan pengamatan dalam melakukan pengamatan:

1. Karakteristik Pengamatan

- 1) Langsung : pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian.

- 2) Sistematis: pengamatan dilakukan secara sistematis, yaitu dengan membuat catatan yang rinci dan terstruktur.
- 3) Tidak Manipulatif: pengamatan tidak memanipulasi perilaku objek penelitian, melainkan hanya mengamati apa yang terjadi secara alami.

2. Langkah-langkah Pengamatan

- 1) Menentukan Tujuan: menentukan tujuan pengamatan dan apa yang ingin diperoleh dari pengamatan.
- 2) Menentukan Informan: Menentukan informan yang akan diamati, seperti individu, kelompok, atau proses.
- 3) Membuat Catatan: Membuat catatan yang rinci dan terstruktur mengenai apa yang diamati.
- 4) Menggunakan Alat Bantu: Menggunakan alat bantu seperti kamera, video, atau audio untuk merekam data.
- 5) Mengolah Data: Mengolah data yang diperoleh dari pengamatan, seperti reduksi dan analisis.

Dengan demikian, pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang efektif dalam mendapatkan data yang akurat dan detail, tetapi memerlukan waktu dan biaya yang cukup serta keterbatasan dalam

beberapa hal. Oleh karena itu peneliti berkesimpulan bahwa observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang mendasari semua ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, untuk mengamati, mencatat, dan memaknai berbagai situasi dan kondisi serta gejala yang terjadi di lokasi penelitian tersebut.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:124). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, flem,dan lain-lain. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang yang termasuk dalam dokumen. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan dan mempelajari data-data yang termasuk dalam dokumen penunjang penelitian ini. Semua foto wawancara di ambil pada saat penelitian di lapangan. Gambar pada penulisan ini hak milik peneliti, ada beberapa yang dikasih oleh kalurahan, dan dari sumber media sosial.

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi dapat

berupa berbagai jenis dokumen, seperti: Laporan : Dokumen laporan yang berisi informasi tentang kegiatan, proyek, atau program. Buku: Buku teks, buku referensi, atau buku yang berisi informasi terkait dengan topik penelitian. Surat : Surat-surat resmi, surat kabar, atau surat lain yang berisi informasi penting. Gambar : Gambar, foto, atau ilustrasi yang berisi informasi visual tentang objek penelitian. Data Statistik : Data statistik yang diperoleh dari sumber resmi, seperti sensus penduduk atau data keuangan.

Langkah-langkah Pengumpulan Data Dokumentasi;

1. Menentukan sumber dokumentasi: Menentukan sumber dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian.
2. Mengumpulkan Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen yang dipilih secara sistematis dan terorganisasi.
3. Mengolah Dokumentasi: Mengolah dokumen untuk memperoleh informasi yang diperlukan, seperti mengcopy, mengscan, atau mengetik.
4. Menganalisis Dokumentasi: Menganalisis dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan dan valid.
5. Menyajikan Dokumentasi: Menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, diagram, atau uraian singkat.

Kelebihan Dokumentasi;

1. Ketersediaan: dokumentasi biasanya tersedia secara luas dan dapat diakses dengan mudah.
2. Kualitas: dokumentasi dapat berisi informasi yang akurat dan detail. Keterbukaan: dokumentasi dapat membantu dalam memahami konteks dan historisitas suatu topik.

Kekurangan Dokumentasi;

1. Keterbatasan: dokumentasi dapat terbatas dalam jumlah dan kualitas.
2. Keterlambatan: dokumentasi dapat terlambat dalam memperoleh informasi yang relevan.
3. Ketergantungan: dokumentasi dapat tergantung pada sumber dan ketersediaan dokumen.

Dokumen pada penelitian ini adalah sejumlah besar peristiwa dan data yang disimpan dalam suatu dokumen sebagai dokumen. Sebagian data yang tersedia berbentuk surat, buku harian, laporan, foto, rekaman audio, dan data kependudukan. Dengan demikian, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berguna dalam penelitian, tetapi memerlukan perhatian khusus dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan.

E. Teknik Pemilihan Informan atau Narasumber

Teknik pemilihan informan atau narasumber dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Beberapa teknik pemilihan informan yang umum digunakan antara lain:

- a. Purposive sampling teknik pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dalam situasi yang diteliti,
- b. Informan kunci (*Key Informant*) merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Mereka seringkali merupakan tokoh kunci atau ahli di bidang yang diteliti,
- c. Informan Utama (*Main Informant*) orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial dan memiliki pengetahuan detail tentang masalah penelitian,
- d. Informan Tambahan (*Additional Informant*) orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

Pemilihan teknik ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, kedalaman informasi yang dibutuhkan, dan karakteristik dari populasi informan yang akan diteliti. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa informan yang dipilih mampu memberikan wawasan yang relevan dan komprehensif terkait dengan topik penelitian. Untuk mengetahui identitas informan berikut penjelasan tentang informan yang menjadi sampel pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata Bantul Setia Ardana

Setia Ardana adalah seorang laki-laki yang berumur 40 tahun, yang menjabat sebagai Fungsional (Aditama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif), informan dengan ramah membantu peneliti dalam proses wawancara, sampai dengan diskusi tentang pengelolaan yang di lakukan di Pantai Parangtritis.

2. Dinas Pariwisata Bantul Y. Apriani

Y. Apriani adalah seorang perempuan yang berumur 49 tahun, yang menjabat sebagai Fungsional (Aditama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif), informan dengan terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

3. Lurah Parangtritis Bapak Topo

Topo adalah seorang laki-laki berumur 71 tahun, yang menjabat sebagai Lurah Desa Parangtritis periode 2012-2018 dan 2018-2024, informan dengan sangat ramah memberikan infomasi yang dibutuhkan peneliti.

4. Ketua Redtribusi Pantai Parangtritis Rohmat

Rohmat adalah seorang laki-laki yang berumur 56 tahun, yang menjabat sebagai ketua redtribusi Pantai Parangtritis, informan sangat membantu peneliti dalam proses mengambil data di lapangan.

5. Sub Koordinasi Pantai Parangtritis Agus Wintolo

Agus Wintolo adalah laki-laki yang berumur 58 tahun, yang menjabat sebagai sub koordinasi Pantai Parangtritis, informan dengan bersedia menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti.

6. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Parangtritis (Pokdarwis) Tri Waldiyana

Tri Waldiyana adalah seorang laki-laki yang berumur 54 tahun, menjabat sebagai ketua pokdarwis di Pantai Parangtritis, informan sangat membantu dalam proses mengambil data, informan menjawab dan menceritakan semua yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata.

7. Sekretaris Pokdarwis Pantai Parangtritis Adi Cahya

Adi Cahya adalah seorang laki-laki yang berumur 29 tahun, menjabat sebagai sekretaris pokdarwis, informan dengan cepat dan tanggap memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

8. Masyarakat Kusnanto

Kusnanto adalah seorang laki-laki yang berumur 45 tahun, warga kabupaten Bantul sekaligus wisatawan yang sering berkunjung di Pantai Parangtritis, informan dengan jelas memberikan pendapatnya tentang pengelolaan pariwisata yang ada di pantai parangtritis.

9. Masyarakat Gonang

Gonang adalah seorang laki-laki yang berumur 35 tahun, warga kabupaten Bantul sekaligus wisatawan lokal yang sering berkunjung di Pantai Parangtritis, informan dengan jelas memberikan pendapatnya terkait pengelolaan.

10. Pemilik Penginapan di Pantai Parangtritis Fajar Aditia Ramadhan

Fajar Aditia Ramadhan adalah seorang laki-laki yang berumur 28 tahun, pemilik penginapan di Pantai Parangtritis sekaligus staf honorer Kalurahan Parangtritis, informan memberikan pendapatnya dengan jelas.

F. Teknik Validasi Data

Validasi data merupakan proses pengujian kebenaran dari data atau bahan yang akan dijadikan dasar kajian dalam penelitian. Validasi data penelitian sangat penting karena memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh. Teknik validasi data adalah proses penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian atau bisnis benar dan akurat.

Teknik validasi data adalah proses untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan, disimpan, dan digunakan adalah akurat, konsisten, dan sesuai dengan tujuan atau standar yang ditetapkan. Validasi data bertujuan untuk mencegah kesalahan, inkonsistensi, dan ketidakakuratan dalam data yang dapat mempengaruhi analisis, laporan, atau pengambilan keputusan.

Teknik validasi data memiliki beberapa kelebihan yang penting, terutama dalam konteks pengelolaan dan analisis data. Berikut adalah beberapa kelebihannya:

1. Meningkatkan Akurasi Data; Validasi data memastikan bahwa data yang dimasukkan atau digunakan adalah akurat dan bebas dari kesalahan. Ini membantu menghasilkan informasi yang lebih andal untuk analisis dan pengambilan keputusan.
2. Mengurangi Kesalahan dan Inkonsistensi: Dengan validasi, data yang tidak konsisten atau salah dapat diidentifikasi dan dikoreksi sebelum digunakan lebih lanjut, mengurangi potensi kesalahan dalam laporan atau analisis.
3. Meningkatkan Kepercayaan dalam Data: Data yang divalidasi meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap data tersebut, baik itu untuk analisis internal maupun laporan eksternal kepada pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan Kualitas Keputusan: Data yang valid dan andal memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih tepat berdasarkan informasi yang tersedia.
5. Memfasilitasi Integrasi Data: Validasi data membantu memastikan bahwa data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan dengan lancar dan konsisten, yang penting dalam lingkungan yang mengandalkan berbagai sistem dan basis data.

Dengan berbagai kelebihan ini, teknik validasi data menjadi komponen penting dalam pengelolaan data yang efektif dan efisien, membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis dan operasional mereka. Beberapa metode validasi data yang dapat digunakan meliputi :

1. Pemeriksaan Format, memeriksa apakah input data dalam format yang benar , dengan demikian, teknik validasi data pemeriksaan format pada saat penelitian lapangan melibatkan penggunaan berbagai metode untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sesuai dengan format yang telah ditetapkan, sehingga data yang diperoleh di lapangan dapat digunakan dengan akurat dan konsisten.
2. Uji kebergantungan peneliti mulai menentukan masalah dan fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Cara untuk menilai dependabilitas dalam penelitian ini adalah peneliti akan berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk memeriksa proses dan hasil penelitian serta taraf kebenaran data serta tafsirannya.
3. Triagulasi Teknik, menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber Triangulasi teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melibatkan lebih dari satu peneliti dalam pengumpulan atau analisis data untuk mengurangi bias subjektif dan mendapatkan interpretasi yang lebih objektif. pada waktu yang berbeda untuk melihat apakah hasilnya konsisten.

Peneliti melakukan analisis independen terhadap data yang sama, kemudian membandingkan hasilnya untuk mencapai kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Agar data dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validasi data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Selanjutnya Sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Namun, data non-numerik yang tidak dapat dihitung secara langsung diperlukan untuk analisis data kualitatif. Analisis konten, naratif, wacana, kerangka kerja, dan teori berasal adalah beberapa jenis analisis data kualitatif yang umum digunakan. Metode ini digunakan untuk mempelajari

fenomena alami dan menjawab pertanyaan tentang penyebabnya, penjelasannya, dan apa yang mendasari subjek penelitian.

Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari Pemerintah Kalurahan Parangtritis selanjutnya melakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.

Setelah semua data terkumpul. baik data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, maka data- data yang. telah dikumpulkan harus segera diolah secara sederhana dan sistematis dan dikelompokan. urutan-urutan pembahasan. Tentunya agar dapat memaknai permasalahan. secara lebih sederhana dan perlu dilakukan dengan menganalisis data.

Teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2008 : 240) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi atau gabungan kegiatan (triangulasi). Pengumpulan data (data collection) dilakukan berhari-

hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti akan melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek tentang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

Untuk mencapai tujuan penelitian, pengumpulan data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta aktual tentang topik penelitian. Tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang valid dan membuktikan hipotesis secara empiris. Untuk mendapatkan data, ada banyak cara, termasuk observasi, wawancara, angket (kuesioner), dan studi dokumen. Metode pengumpulan data ini sangat terkait dengan masalah penelitian yang ingin diselesaikan, dan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data yang relevan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data (*data reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dalam mereduksi data, setiap penelitian akan dipandu oleh tujuan yang dicapai. Tujuan utama dari penelitian dalam kualitatif adalah pada temuan. Apa bila dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data yang merupakan

proses. berfikir sensitif yang memerlukan. kecerdasan kedalam wawasan yang tinggi.

Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, reduksi data adalah proses yang difokuskan pada pemilihan, pengambilan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Selain itu, reduksi data adalah proses berpikir kritis yang memerlukan banyak pemikiran kritis, yang memungkinkan peneliti memahami data dengan lebih baik dan memudahkan analisisnya. Hasil reduksi data diolah menjadi bentuk seperti sketsa, sinopsis, matriks, dan lainnya.

c. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam. melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

Proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan bermakna disebut penyajian data. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk mengorganisir, merangkum,

dan memvisualisasikan data sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan mudah oleh orang yang tidak memiliki pengalaman teknis sebelumnya. Narasi, diagram, dan tabel adalah beberapa bentuk penyajian data. Nilai dari satu set data ditunjukkan dalam diagram, sedangkan narasi menampilkan data dalam bentuk grafik. Ketika data diolah dengan benar, penyajian data membantu pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan masalah yang dihadapi, sehingga keputusan yang lebih baik dapat dibuat.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam analisis data kualitatif. Di sini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis data untuk membuat kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang peneliti pelajari. Tujuan kesimpulan adalah untuk menentukan makna, hubungan, persamaan, dan perbedaan dari data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya, kesimpulan awal yang disampaikan hanya sementara dan dapat berubah.

Tahap verifikasi dilakukan untuk memastikan data yang dikumpulkan benar dan membandingkan hasil analisis dengan interpretasi data untuk menemukan solusi masalah. Tujuan verifikasi adalah untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dibuat kredibel dan valid serta untuk menemukan atau memahami makna dan fungsi dari data yang dikumpulkan. Untuk memastikan bahwa data benar, proses

verifikasi melibatkan pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan berulang-ulang selama waktu penelitian.

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, maka akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, bila kesimpulan yang ditemukan data berikutnya pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru dan temuan baru yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya yang masih belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Keabsahan data yang telah dianalisis dilakukan dengan cara triangulasi yaitu dengan teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pembanding terhadap data tersebut. (Moleong, 1999 dalam Sugiyanto,dkk 2010,6). Menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan data hasil wawancara terbuka terstruktur dengan hasil observasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pemerintah Kalurahan Parangtritis

Kalurahan Parangtritis awalnya terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kelurahan Sono dan Kelurahan Grogol. Kelurahan Grogol terletak di bagian timur Desa Parangtritis, sedangkan Kelurahan Sono terletak di bagian barat Parangtritis. Lokasi kelurahan ini mempengaruhi ekonomi masyarakat. Perkembangan ekonomi di masa lampau tumbuh lebih cepat di Kelurahan Grogol. Masyarakat Kelurahan Grogol memiliki lahan sawah yang cukup luas dan juga mempunyai pariwisata Pantai Parangtritis yang sudah berkembang sejak penjajahan Belanda, sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya secara mandiri. Pada tahun 1946 kedua kelurahan ini bergabung menjadi Desa Parangtritis. Kelurahan Sono terpecah menjadi 6 dusun yaitu Dusun Duwuran, Dusun Kretek, Dusun Sono, Dusun Samiran, Dusun Bungkus dan Dusun Depok. Kelurahan Grogol terpecah menjadi 5 dusun yaitu Grogol VII, Grogol VIII, Grogol IX, Grogol X dan Mancingan.

Perkembangan sarana dan infrastruktur transportasi di Kalurahan Parangtritis mulai dilakukan pada tahun 1980. Jaringan jalan utama dan penghubung sebelumnya hanya berupa batu dan material tanah mulai diaspal. Pada tahun 1989 dibangun jembatan melintasi Sungai Opak yang menghubungkan antara Kalurahan Parangtritis dan Kalurahan Donotirto. Jembatan ini dikenal dengan nama Jembatan Kretek. Hambatan dari sarana

transportasi telah hilang, Kalurahan Parangtritis sudah dapat diakses dengan mudah. Sejak saat itu Kalurahan Parangtritis mulai berkembang sebagai daerah tujuan wisata. Tempat wisata yang mulai dikenal adalah Pantai Depok. Pantai Depok mulai diresmikan tahun 1998. Perkembangan ekonomi warga di sekitar Pantai Depok mulai meningkat. Dusun Depok mampu berkembang lebih cepat dibandingkan dengan dusun yang lain.

a. Sejarah Pantai Parangtritis

Dikutip dari buku berjudul Peningkatan Pariwisata Pesisir Pulau Jawa oleh Dr Noto Pamungkas, dkk, menurut kisah legenda, pada zaman Kerajaan Majapahit ada seorang pelarian dari kerajaan tersebut yang bernama Dipokusumo, di pantai itu ia melakukan semadi. Ketika sedang melakukan semadi, ia melihat air menetes (tumaritis) yang berasal dari celah-celah batukarang (parang) Kemudian, Dipokusumo memberi nama daerah itu 'Parangtritis', yang berarti 'air yang menetes dari batu'. Pantai ini diyakini oleh masyarakat setempat sebagai perwujudan kesatuan antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Pantai Parangtritis. Oleh karena itu, masyarakat Yogyakarta selalu menghubungkan ketiganya apabila ada fenomena alam yang sedang terjadi di antara ketiga tempat tersebut.

b. Visi dan Misi Kalurahan Parangtritis

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Desa Parangtritis Yang Maju, Sejahtera Lahir Batin Dan Berprestasi Melalui Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Optimal Dan Tata Kelola Pemerintah Yang Jujur Bersih Dan Akuntabel”

MISI

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu melaksanakan pembangunan di Kalurahan Parangtritis melalui pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan.
- 2) Menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berkeadilan.
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan penguatan bantuan modal.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- 5) Mewujudkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertaqwya.
- 6) Meningkatkan pelayanan administrasi, pelayanan sosial, kesehatan, Pendidikan dan karang taruna.
- 7) Membentuk dan mengembangkan BUMDes serta penguatan modal BUM Desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
- 8) Mengoptimalkan sector pertanian dan industri rumah tangga baik tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasilnya.

c. Susunan Organisasi Pemerintahan Kalurahan Parangtritis

Menurut Rekshohadiprodjo dan Handoko (2017), struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki, dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu saling terkoordinasi. Struktur organisasi memiliki fungsi yang penting, dalam mencapai tujuan organisasi dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti spesialisasi kerja, rantai komando, dan formalisasi. Dan penjelasan diatas dapat lebih mudah dipahami dengan gambar sebagai berikut;

Gambar 3.1

Susunan Organisasi Pemerintahan Kalurahan Parangtritis



Sumber : Profil Pemerintahan Kalurahan Patangtritis 2024

Struktur Pemerintahan Kalurahan Parangtritis

Lurah : Topo

Carik : Wursidi

Jagabaya : Karjana, S.H

Ulu-ulu : Elyas Suprapta, S.E

Kamituw : Wiratmanto

Kaur Tata Laksana : Syahwan Udin, S.Si

Kaur Danarta : Siti Istiningsih, S.T

Kaur Pangripta : Sumpeni, S.Si

Staf Kalurahan Parangtritis :

1. Isdi Sutarto
2. Nurjaka Edy Susanto
3. Purjiyanta
4. Ristini Asih
5. Nanang Andarwanto
6. Adi Cahya
7. Irfan Ahmad Fauzi
8. Nawar Lina Syarifah

9. Sanita Tyas Safitri

10. Afrianto Anugrah

B. Kondisi Klimatologi dan Meteologi

Karena Kalurahan Parangtritis berada di daerah kepesisiran, sirkulasi lautan, daratan, dan atmosfer sangat memengaruhi kondisi iklim dan cuaca setempat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2008), Desa Parangtritis memiliki iklim dengan klasifikasi Schmidt-Ferguson D (sedang). Nilai Q, atau persentase perbandingan bulan basah dan kering, berkisar antara 60 dan 100 persen. Data meteorologi yang digunakan berasal dari curah hujan Stasiun Pundong selama 30 tahun (1973-2002).

Kalurahan Parangtritis memiliki tipe iklim muson yaitu iklim yang memiliki satu puncak dan satu palung. Kondisi tipe iklim muson dapat diketahui dengan memaparkan rerata curah hujan bulanan Bulan Januari-Desember (untuk melihat palung) dan Juli-Juni (untuk melihat puncak) . Satu puncak merupakan satu periode bulan basah, yaitu pada Bulan November hingga Maret (NDJFM) yang dipengaruhi muson barat laut yang basah. Satu palung merupakan satu periode bulan kering, yaitu Bulan Mei hingga September (MJAS) yang dipengaruhi muson tenggara yang kering. Saat Bulan Juni hingga November, pola hujan di Desa Parangtritis sangat dipengaruhi oleh fenomena El Nino Southern Oscillation (ENSO) yang mempengaruhi terjadinya musim kemarau (Aldrian dan Susanto, 2003).

Rerata curah hujan tahunan di Kalurahan Parangtritis adalah 1000-2000 mm/tahun (Dinas PUP-ESDM Pemda DIY, 2014). Data yang digunakan adalah data curah hujan dari tiga stasiun hujan di sekitar Desa Parangtritis yaitu Stasiun Hujan Siluk (1982-2011), Stasiun Hujan Sanden (1986-2011), dan Stasiun Hujan Pundong (1981-2011). Data curah hujan diperoleh dari DPUP DIY.

Rerata suhu bulanan di sekitar Kalurahan Parangtritis adalah 26-27o C (Malawani, 2014). Perhitungan dilakukan berdasarkan data suhu bulanan dari Stasiun Adisucipto dari tahun 1993-2007. Nilai rerata suhu bula nan diperoleh dari rumus Mock yang mengkonversi suhu dari ketinggian tertentu untuk interpolasi suhu di daerah lain dengan ketinggian yang berbeda. Stasiun Adisucipto berada pada elevasi 122 m dpl, sedangkan pesisir Parangtritis memiliki elevasi sekitar 6,25 m dpl. Hasil perhitungan menunjukkan suhu bulanan terendah terjadi pada Bulan Maret yaitu 25,87o C dan suhu bulanan tertinggi terjadi pada Bulan Oktober yaitu 28,04o C.

Kondisi iklim dan cuaca di Kalurahan Parangtritis dipengaruhi oleh angin. Angin juga berperan dalam pembentukan gumuk pasir. Berdasarkan hasil pengukuran angin di Kawasan Gumuk Pasir oleh Dinas PUP-ESDM Pemda DIY (2014), rerata kecepatan angin pada siang hari adalah 5,3-9,2 m/s. Angin dominan bergerak ke arah barat laut dengan sudut sekitar 310-335o . Hal inilah yang menyebabkan bentukan spesifik gumuk pasir seperti barkhan dan lidah (ripple mark) membentang ke arah barat laut.

C. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok yang menepati wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka wantu satu tahun pada saat dilaksanakan pendataan atau densus penduduk, sesuai data yang diperoleh pada monografi Kalurahan Parangtritis jumlah penduduk sebesar 8.001 jiwa, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Kalurahan Parangtritis

Menurut Jenis Kelamin

NO	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	3.933
2	Perempuan	4.068
	Jumlah	8.001

Sumber : data Monografi Kalurahan Parangtritis 20224

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat diketahui dan di analisis bahwa jumlah penduduk laki-laki berjumlah 3.933 dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.068. Terdapat perbedaan antara perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dan yang berjenis kelamin laki-laki namun tidak begitu signifikan dan cukup berimbang. Namun cukup berdampak terutama bidang tenaga kerja pertanian yang dimana peran laki-laki begitu besar karena pekerjaan pertanian membutuhkan tenaga lebih,

akan tetapi posisi perempuan tak kalah penting dengan ketelitiannya dalam mengerjakan segala sesuatu.

b. Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilih kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan pengetahuan umum serta diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan Undang-Undang.

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum Masuk Tk	1.268
2	Yang Sedang Sekolah	618
3	SD	1.363
4	SMP	1.364
5	SMA/Sederajat	2.526
6	Akademi/D1-d3	232
7	Sarjana S1	598
8	Pascasarjana (S2 dan S3)	32
	Jumlah	8.001

Sumber: Data Monografi Desa Parangtritis 2024

Penduduk di Kalurahan Parangtritis memiliki pendidikan mulai dari Tk Akademi D1-D3, SI dan Pascasarjana (S2 dan S3) berjumlah 630 jiwa. Sedangkan jumlah pendidikan terbanyak didominasi pada tingkat SMA/Sederajat yaitu 2.526 jiwa dan disusul oleh penduduk pada tingkat pendidikan SMP sebesar 1.364 jiwa dari seluruh jumlah pada tingkat pendidikan di Kalurahan Parangtritis. Dari hal tersebut penduduk Kalurahan Parangtritis memiliki tingkat pendidikan yang tergolong cukup tinggi.

c. Komposisi Menurut Agama

Pengertian agama menurut pandangan pemerintah Indonesia adalah sebagai sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan (atau sejenisnya) serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pergaulan manusia. Pengertian agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Agama dapat diartikan sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas alam semesta, serta sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan pada keyakinan tertentu. Dalam beberapa sumber, agama juga dijabarkan sebagai proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia.

Tabel 3.3
Komposisi Deskripsi Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.863
2	Kristen Protestan	116
3	Katolik	20
4	Hindu	1
5	Budha	1
6	Konghucu	0
	Jumlah	8.001

Sumber: Data Monografi Kalurahan Parangtritis 2024

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Parangtritis beragama Islam,yaitu berjumlah 7.863 jiwa, agam Katolik berjumlah 20 jiwa, agama kristen 116 jiwa, agama Hindu berjumlah 1 jiwa dan yang terakhir agama Budha berjumlah 1 jiwa.

d. Mata Pencaharian Pokok

Mata pencaharian pokok merujuk pada pekerjaan utama atau sumber penghasilan utama yang dijalani seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian pokok ini bisa bervariasi tergantung pada lingkungan, budaya, dan kondisi ekonomi suatu daerah. Mata pencaharian pokok termasuk pertanian, nelayan, peternakan, perdagangan, pegawai negeri, karyawan swasta, dan lain-lain. Dalam konteks ini, mata pencaharian pokok merupakan aktivitas yang memberikan pendapatan

paling signifikan bagi individu atau keluarga, memungkinkan mereka untuk membeli kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Pokok Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	523
2	Buruh Tani	1.732
3	Pegawai Negri Sipil	200
4	Dokter Swasta	5
5	TNI	61
6	POLRI	61
7	Guru Swasta	50
8	Karyawan Perusahaan Swasta	609
9	Karyawan Perusahaan Pemerintah	7
10	Wiraswasta	1.684
11	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	486
12	Belum Bekerja	670
13	Pelajar	1.210
14	Ibu Rumah Tangga	298
15	Purnawiraan/Pensiunan	102
16	Buruh Harian Lepas	300
	Jumlah	8.001

Sumber, Data Monografi Kalurahan Parangtritis 2024

Berdasarkan Tabel 3.4 sebagian besar penduduk Kalurahan Parangtritis memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani dengan jumlah

1.732 jiwa. Mengakibatkan Kalurahan Parangtritis merupakan salah satu desa penghasil pangan. Penduduk biasanya membudidayakan bawang merah, padi, cabai, dan palawija. Namun dalam siklus tanam yang dimiliki oleh petani yaitu padi-bawang merah-cabai-bawang merah, terlihat jelas bahwa komoditas unggulan dari Kalurahan Parangtritis adalah bawang merah dengan varietas corak kuning yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh penduduk setempat. Jumlah tertinggi selanjutnya adalah sektor wiraswasta yaitu sebanyak terdiri dari 1.684 jiwa. Sektor ini didukung dengan adanya sektor pariwisata yang dimiliki oleh Kalurahan Parangtritis yang membuka jalur ekonomi tersendiri bagi penduduk desa. Namun, sektor wiraswasta ini belum menyentuh pada hasil olahan pangan unggulan dari desa sehingga hasil pertanian dari petani hanya dipasarkan dalam kondisi mentah saja. Sementara itu, hasil jumlah terendah adalah Dokter Swasta yaitu 7 orang. Hal ini dikarenakan oleh menjadi seorang Dokter membutuhkan lisensi dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Selain itu, alasan kemauan atau motivasi untuk menjadi Dokter tidak dimiliki semua orang, sehingga mata pencaharian pada sektor ini sangat jarang ditemui.

e. Keadaan Geografis

Wilayah Kalurahan Parangtritis berada pada dataran rendah yaitu 15 meter diatas permukaan laut, dengan suhu yang tercatat pada 28°C hingga suhu tertinggi pada 32°C dengan bentang wilayah 95% berupa areal tanah datar dan 5% berupa daerah berombak hingga berbukit. Kalurahan

Parangtritis merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Parangtritis memiliki luas 11,87 km².

a. Keadaan Wilayah

Desa Parangtritis terdiri dari 11 padukuhan, diantaranya sebagai berikut :

1. Dususn Sono
2. Dusun Samiran
3. Dusun Bungkis
4. Dusun Depok
5. Dusun Duwuran
6. Dusun Grogol VII
7. Dusun Grogol VIII
8. Dusun Grogol IX
9. Dusun Grogol X
10. Dusun Mancingan
11. Dukuh Kretek

b. Batas Wilayah

Batas wilayah Kalurahan Parangtritis terletak dikecamatan Kretek, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogjakarta dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kalurahan Donotirto
2. Sebelah Selatan : Samodra Indonesia

3. Sebelah Barat : Desa Tirtohargo
4. Sebelah Timur : Kalurahan Seloharjo dan Kalurahan Girijati

c. Penggunaan Tanah

Luas wilayah Kalurahan Parangtritis adalah 11, 87 km² yang terdiri dari :

1. Tanah sawah
2. Tanah kering
3. Tanah basah (tambak, kebun desa, bangunan sekolah, dan panar)
4. Tanah keperluan umum (lapangan olahraga, tanah rekreasi, jalur hutan dan pemakaman) .

Tabel 3.5

Luas Lahan Tanah Menurut Penggunaan Tanah

No	Jumlah Penggunaan	Luas (Hektar)
1	Tanah Sawah	167,80
2	Tanah Kering	616,56
3	Tanah Basah	16,00
4	Tanah Keperluan Umum	98,63
5	Tanah Hutan	18,52
6	Pegunungan	917,51
	Jumlah	1.835,02

Sumber: Data Monografi Kalurahan Parangtritis 2024

Dari tabel 3.5 diatas, dapat dijelaskan bahwa luas tanah pegunungan memiliki persentase tertinggi pada luas lahan pertanian yang ada di Kalurahan Parangtritis, yakni berada pada angka 917,51 dari keseluruhan luas lahan sebesar 1.835,02 Ha. Dan luas lahan tanah kering

menempati luas lahan terbesar kedua setelah lahan kering yaitu 616,56 Ha atau dari keseluruhan jumlah luas lahan pertanian yang ada di Kalurahan Parangtritis. Kemudian sisanya terbagi pada luas tanah hutan, fasilitas umum, luas tanah basah, dan luas tanah sawah 167,80 Ha , luas tanah hutan sebesar 18,52 Ha, luas tanah basah sebesar 16,00 Ha dan luas fasilitas umum 98,63 Ha atau yang terdiri dari penggunaan sebagai kebun desa, fasilitas umum perkantiran, bangunan sekolah, pasar serta berbagai fasilitas umum lain yang termasuk pada kategori public facilities di Kalurahan Parangtritis.

D. Gambaran Pantai Parangtritis

Pantai Parangtritis merupakan salah satu objek wisata yang menjadi daya tarik andalan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pantai ini memiliki pemandangan alam laut yang indah. Wisata pantai Parangtritis terletak di Kalurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, sekitar 27 km sebelah selatan Kota Yogyakarta. Pantai Parangtritis saat ini semakin berkembang dan terus dilakukan perbaikan sarana maupun prasarana. Perkembangan objek wisata di Pantai Parangtritis bisa dilihat dari beberapa objek wisata menarik di pantai Parangtritis, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata keagamaan, wisata sejarah, wisata kuliner dan wisata edukasi. Dapat dilihat juga dari jumlah wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya. Adapun batas-batas Pantai Parangtritis adalah sebagai berikut : 1. Bagian utara : dibatasi oleh sungai Opak dan sungai Oyo. 2. Bagian selatan : dibatasi oleh Samudera Hindia. 3. Bagian

barat : dibatasi oleh sungai Opak hilir. 4. Bagian timur : dibatasi oleh pegunungan karst (pegunungan sewu).

Pantai Parangtritis, terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terkenal dengan keindahan alam dan mitos yang melekat padanya. Berikut adalah beberapa kelebihan dari Pantai Parangtritis:

Kelebihan Pantai Parangtritis

- a. Pemandangan alam yang unik; pantai ini memiliki panorama yang menakjubkan dengan ombak besar dan gunung pasir yang mengelilingi kawasan pantai. Ombak di sini bisa mencapai ketinggian 2 hingga 4 meter, memberikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang menikmati keindahan alamnya.
- b. Aktivitas wisata beragam; pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga di pantai, menikmati pemandangan matahari terbenam, serta menjelajahi gunung pasir. Tersedia juga fasilitas seperti kolam renang, penyewaan ATV, dan jip wisata.
- c. Mitos dan legenda; Pantai Parangtritis dikenal dengan cerita mistisnya, termasuk legenda Nyi Roro Kidul, yang menambah daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan budaya dan sejarah lokal.
- d. Fasilitas yang Memadai; kawasan ini dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat, menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti tempat parkir, pemandian umum, dan area bersantai. Tiket masuknya juga terjangkau, sekitar Rp15.000 per orang.

- e. Ketenangan dan kualitas Udara, udara di Pantai Parangtritis cenderung sejuk dan menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk bersantai dan melepas penat dari rutinitas sehari-hari.
- f. Aksesibilitas; pantai ini dapat diakses dengan mudah dari pusat kota Yogyakarta, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum, sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung.

Dengan kombinasi keindahan alam, aktivitas menarik, dan keunikan budaya, Pantai Parangtritis menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Yogyakarta.

Gambar 3.2 Pantai Parangtritis





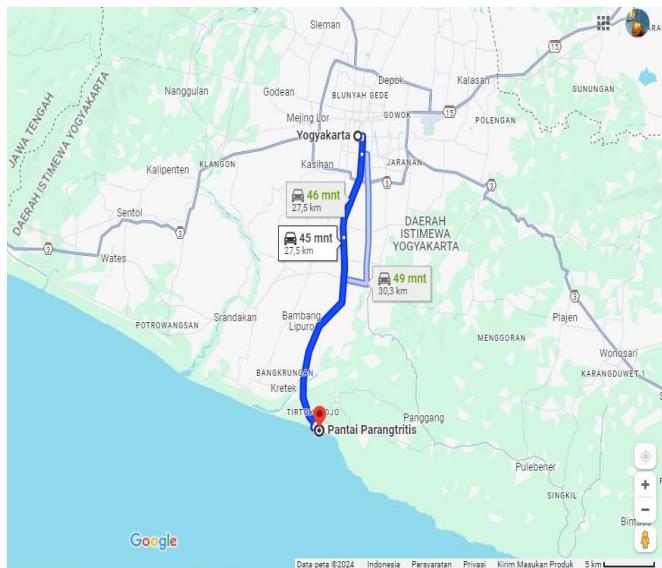
(Sumber: Foto Pribadi 2024)

a. Aksesibilitas

Wisatawan yang ingin ke Pantai Parangtritis bisa menaiki bus. Rute Terminal Giwangan - Parangtritis dilayani oleh bus Abadi (24 unit). Biasanya ada tulisan Jogja- Parangtritis di kaca depan. Wisatawan bisa tinggal naik bus dari terminal ini dengan tujuan ke Pantai Parangtritis. Dari kota Yogyakarta, wisatawan dapat mengambil rute dengan melewati ringroad dan berjalan ke selatan hingga bertemu dengan lampu lalu lintas yang terdapat petunjuk arah Jl. Parangtritis/Institut Seni Indonesia (ISI). Setelah berada di Jalan Parangtritis, wisatawan hanya perlu mengikuti jalan hingga bertemu dengan gerbang tiket Pantai Parangtritis. Selanjutnya sepanjang jalan, wisatawan akan menemui beberapa jalur masuk pantai yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, rute perjalanan menuju lokasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar. 3.3

Rute dari Terminal Giwangan menuju ke Pantai Parangtritis



(Sumber: Google Maps, 2024)

b. Kelembagaan

Pengelolaan obyek wisata Pantai Parangtritis berada dibawah wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, namun sejak pemisahan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, pengelolaan obyek wisata Pantai Parangtritis berada dibawah Dinas Pariwisata. Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja dan menfokuskan kerja satuan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang yang telah ditetapkan. Pengelolaan Pantai Parangtritis dilakukan oleh perwakilan penduduk lokal yang tergabung dalam Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Parangtritis yang didampingi

oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang berperan sebagai pihak yang juga merumuskan arah kebijakan pengembangan, mengatur dan menyediakan infrastruktur wisata.

c. Amenitas Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis

Amenitas dalam pengelolaan pariwisata pantai Parangtritis sangat penting untuk meningkatkan daya tarik dan kenyamanan pengunjung. Beberapa amenitas yang diimplementasikan meliputi:

1. Akomodasi, penyediaan berbagai jenis penginapan, mulai dari hotel, vila, hingga homestay untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen wisatawan.
2. Restoran dan kafe, menyediakan berbagai pilihan tempat makan yang menawarkan makanan lokal maupun internasional, dengan kebersihan dan kualitas yang terjaga.
3. Toilet dan fasilitas mandi, memastikan ketersediaan toilet umum yang bersih dan fasilitas mandi yang memadai bagi pengunjung.
4. Tempat parkir, penyediaan area parkir yang cukup luas dan aman untuk kendaraan pengunjung.
5. Tempat duduk dan area bersantai, menyediakan tempat duduk dan area teduh di sekitar pantai untuk pengunjung yang ingin bersantai.
6. Pusat informasi wisata, menyediakan pusat informasi yang memberikan informasi lengkap tentang pantai, aktivitas yang dapat dilakukan, serta peta dan panduan wisata.

7. Fasilitas keamanan, menyediakan pos penjaga pantai dan petugas keamanan untuk memastikan keselamatan pengunjung.
8. Aksesibilitas, memastikan akses yang mudah bagi semua pengunjung, termasuk penyediaan fasilitas untuk pengunjung dengan kebutuhan khusus.
9. Aktivitas Wisata, menyediakan berbagai aktivitas seperti olahraga air, penyewaan peralatan, tur keliling pantai, dan kegiatan budaya untuk menarik lebih banyak pengunjung.
10. Fasilitas Kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan darurat atau klinik kecil untuk menangani situasi darurat.
11. Tempat Sampah dan kebersihan, menyediakan tempat sampah yang cukup dan menjaga kebersihan pantai untuk menciptakan lingkungan yang nyaman.

Dengan memperhatikan dan mengembangkan amenitas ini, pengelolaan pariwisata di Pantai Parangtritis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan.

d. Kondisi Pantai Parangtritis

Kondisi pesisir laut di Pantai Parangtritis memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Palung Laut, belasan palung laut muncul di sepanjang pantai, palung laut ini berjarak sekitar 7 meter dari bibir pantai dan membahayakan wisatawan yang mandi di laut karena kerap menjadi pemicu kecelakaan laut.

2. Ketinggian ombak, ketinggian ombak di Pantai Parangtritis relatif sedang, berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Ini termasuk dalam kategori sedang dan tidak ekstrem.
3. Pasang surut air laut, koefisien pasang surut air laut di Pantai Parangtritis adalah 69, yang menunjukkan bahwa ketinggian ombak paling sering adalah sekitar separuh dari ketinggian ombak signifikan.
4. Aktivitas vulkanik, Pantai Parangtritis terbentuk karena adanya gelombang laut yang memiliki energi besar dan menghancurkan daratan (erosi laut). Selain itu, gunung-gunung pasir di sekitar pantai terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Merapi.
5. Pemanfaatan pesisir, pemanfaatan daerah pesisir pantai di Kalurahan Parangtritis kurang maksimal karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan karakteristik dari masing-masing pantai yang ada.
6. Perubahan Garis Pantai, dinamika pesisir pantai Kalurahan Parangtritis sangat dipengaruhi oleh pasang surut serta gelombang yang terkenal besar untuk daerah pantai selatan. Perubahan garis pantai, kemiringan lahan, serta jenis pantai menentukan faktor dominan yang mempengaruhi karakteristik pantai di Kalurahan Parangtritis.

Dengan demikian, keadaan pesisir laut di Pantai Parangtritis memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, termasuk

kemunculan palung laut, ketinggian ombak sedang, pasang surut air laut yang stabil, dan aktivitas vulkanik yang mempengaruhi bentuk lahan laut (marine).

E. Ekonomi

Mata pencarian utama penduduk Dusun Kretek adalah sebagai petani dan sebagian yang lain bekerja sebagai tukang, buruh tani, wiraswasta, karyawan swasta, TNI, POLRI dan PNS. Produksi pertanian di Dusun Kretek dalam satu tahun meliputi padi, bawang merah, cabai. Dalam sektor pertanian, petani parangtritis menanam tanaman seperti padi, cabai, bawang merah, dan tanaman palawija. Dalam sektor perikanan, mereka menanam ikan, tambak udang, nelayan, dan pengolahan ikan tawar. Salah satu bagian penting dari ekonomi masyarakat Parangtritis adalah peternakan, dengan rata-rata setiap keluarga memiliki ternak, baik unggas, kambing, atau sapi. Industri kecil adalah jenis industri yang ada di Kalurahan Parangtritis. Industri kecil ini termasuk tahu, tempe, telur asin, kerajinan bambu, batako, alat sandboarding, serabi, hasil laut, keripik pisang, kacang mete, kerajinan bonsai, kerajinan batu alam, dan kerajinan tangan.

Pada sektor pertanian, komoditas tanaman petani parangtritis antara lain padi, cabai, bawang merah dan tanaman palawija. Kegiatan di sektor perikanan antara lain budidaya ikan tawar, tambak udang, nelayan dan pengolahan ikan. Sektor peternakan menjadi salah satu komponen aktivitas ekonomi masyarakat Parangtritis, rata-rata setiap keluarga memiliki salah

satu hewan ternak baik sejenis unggas, kambing maupun sapi. Pada sektor industri tergolong pada industri kecil. Industri kecil yang ada di Kalurahan Parangtritis antara lain industri tahu, tempe, telur asin, kerajinan bambu, batako, alat sandboarding, serabi, hasil olahan laut, keripik pisang, kacang mete, kerajinan bonsai, kerajinan batu alam dan handicraft.

[Maulana/publication/311081727_BUKU DESKRIPSI PETA DESA PA
RANGTRITIS/links/583d52a708ae3cb63656fe44/BUKU-DESKRIPSI-
PETA-DESA-PARANGTRITIS.pdf](Maulana/publication/311081727_BUKU DESKRIPSI PETA DESA PARANGTRITIS/links/583d52a708ae3cb63656fe44/BUKU-DESKRIPSI-PETA-DESA-PARANGTRITIS.pdf)

Warga yang bekerja di Kalurahan Parangtritis berusia antara 20 dan 56 tahun. Kalurahan Parangtritis dianggap baik berdasarkan kesehatan masyarakatnya, dapat dilihat dari mulai berkembangnya ekonomi di semua bidang dan munculnya lapangan kerja baru di sektor pariwisata, khususnya bagi orang-orang di Pantai Parangtritis dan orang-orang dari daerah lain.

Jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk pra-sejahtera yang terdaftar mendapatkan bantuan Keluarga Miskin (Gakin) menunjukkan kondisi sektor perekonomian lain. sekitar 700 Kepala Keluarga (KK). Sekitar 300 KK adalah jumlah keluarga yang layak mendapatkan bantuan Gakin; keluarga lain tidak layak karena mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan primer dan tersier. Setiap KK Gakin menerima kambing secara bergilir sebagai bantuan pemerintah desa kepada Gakin. Salah satu bantuan desa lainnya adalah tanah kas desa yang diberikan ke dusun untuk dijual kepada warga yang tidak memiliki sawah. Tanah kas ini dijual setengah harga pasar, tetapi kebijakan ini tidak berhasil karena kurangnya tanah.

Dana, retribusi, dan PAD (Pendapatan Asli Desa) yang sudah ditetapkan adalah cara pemerintah membantu desa. Bantuan ini digunakan untuk dana pembangunan desa dan dusun serta tunjangan karyawan kelurahan. Kurang lebih 2,8 miliar rupiah diberikan setiap tahun, dengan sekitar 400 juta rupiah dialokasikan untuk tunjangan penghasilan staf pemerintah.

Penduduk yang menanam bawang merah dengan lahan 1.000 m² memerlukan modal sekitar Rp 4.000.000 untuk pengadaan benih. Biaya yang lain untuk penggalian lubang dan penanaman berkisar Rp 600.000 hingga Rp 1.000.000. Hasil panen bawang merah bisa mencapai 8 kuintal dengan harga Rp 15.000.000 hingga Rp 18.000.000 per kg. Modal pertanian cabai dengan luas tanah 1.000 m² bisa mencapai Rp 3.000.000. Nilai jual hasil panen komoditas cabai sangat bergantung pada kondisi harga pasar, sedangkan untuk hasil panen bisa mencapai 6 - 8 kuintal. Harga jual rata-rata cabai adalah Rp 8.000. Harga terendah pernah mencapai Rp 2.000 dan harga tertinggi mencapai Rp 20.000. Ada perbedaan harga penjualan cabai merah dan cabai hijau. Pada tahun 2015 harga tertinggi cabai merah berkisar Rp 9.000 hingga Rp 10.000, sedangkan untuk cabai hijau berkisar Rp 3.000 hingga Rp 4.000. Komoditas padi dengan luas tanah 1.000 m² sekitar Rp 2.000.000 dengan hasil panen sebanyak lima kuintal Hasil panen padi biasanya hanya dikonsumsi untuk konsumsi sehari-hari dan tidak dijual. Sebagian besar ekonomi Dusun Kretek bergantung pada pertanian; sektor lain seperti perikanan, perkebunan, dan kehutanan tidak menghasilkan nilai

ekonomi yang signifikan; khususnya, kehutanan adalah hanya hutan yang menghasilkan tanaman jati.

Maulana/publication/311081727_BUKUDESKRIPSI_PETA_DESA_PARANGTRITIS/links/583d52a708ae3cb63656fe44UKU-DESKRIPSI-PETA-DESA-PARANGTRITIS.pdf

Dusun Kretek memiliki dua kelompok tani, yang pertama adalah "Sido Subur" yang sudah lama ada, dan yang kedua masih dalam tahap pembangunan dan pengajuan. Sektor pertanian mendapat manfaat dari keberadaan kelompok tani karena ada sosialisasi penanaman, penyaluran obat, pemakaian obat, bantuan pupuk dan benih, dan sangat membantu petani.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Infoman

Deskripsi informan secara umum adalah penjelasan singkat yang mencakup subjek yang sedang dianalisis. Deskripsi ini memberikan gambaran awal tentang subjek tersebut dan membantu dalam memahami konteks dan sifat subjek tersebut. Deskripsi informan biasanya mencakup informasi dasar seperti nama, usia, jenis kelamin, profesi, dan informasi relevan lainnya terkait subjek yang sedang dipelajari. Informan dalam penelitian ini berasal dari lingkup Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kebijakan terkait dengan pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis. Untuk mengetahui identitas informan berikut penjelasan tentang informan yang menjadi sampel pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata Bantul Setia Ardana

Setia Ardana adalah seorang laki-laki yang berumur 40 tahun, yang menjabat sebagai Fungsional (Aditama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif), informan dengan ramah membantu peneliti dalam proses wawancara, sampai dengan diskusi tentang pengelolaan yang di lakukan di Pantai Parangtritis.

2. Dinas Pariwisata Bantul Y. Apriani

Y. Apriani adalah seorang perempuan yang berumur 49 tahun, yang menjabat sebagai Fungsional (Aditama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif), informan dengan terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

3. Lurah Parangtritis Bapak Topo

Topo adalah seorang laki-laki berumur 71 tahun, yang menjabat sebagai Lurah Desa Parangtritis periode 2012-2018 dan 2018-2024, informan dengan sangat ramah memberikan infomasi yang dibutuhkan peneliti.

4. Ketua Redtribusi Pantai Parangtritis Rohmat

Rohmat adalah seorang laki-laki yang berumur 56 tahun, yang menjabat sebagai ketua redtribusi Pantai Parangtritis, informan sangat membantu peneliti dalam proses mengambil data di lapangan.

5. Sub Koordinasi Pantai Parangtritis Agus Wintolo

Agus Wintolo adalah laki-laki yang berumur 58 tahun, yang menjabat sebagai sub koordinasi Pantai Parangtritis, informan dengan bersedia menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti.

6. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pantai Parangtritis (Pokdarwis) Tri Waldiyana

Tri Waldiyana adalah seorang laki-laki yang berumur 54 tahun, menjabat sebagai ketua pokdarwis di Pantai Parangtritis, informan sangat membantu dalam proses mengambil data, informan menjawab dan menceritakan semua yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata.

7. Sekretaris Pokdarwis Pantai Parangtritis Adi Cahya

Adi Cahya adalah seorang laki-laki yang berumur 29 tahun, menjabat sebagai sekretaris pokdarwis, informan dengan cepat dan tanggap memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

8. Masyarakat Kusnanto

Kusnanto adalah seorang laki-laki yang berumur 45 tahun, warga kabupaten Bantul sekaligus wisatawan yang sering berkunjung di Pantai Parangtritis, informan dengan jelas memberikan pendapatnya tentang pengelolaan pariwisata yang ada di pantai parangtritis.

9. Masyarakat Gonang

Gonang adalah seorang laki-laki yang berumur 35 tahun, warga kabupaten Bantul sekaligus wisatawan lokal yang sering berkunjung di Pantai Parangtritis, informan dengan jelas memberikan pendapatnya terkait pengelolaan.

10. Pemilik Penginapan di Pantai Parangtritis Fajar Aditia Ramadhan

Fajar Aditia Ramadhan adalah seorang laki-laki yang berumur 28 tahun, pemilik penginapan di Pantai Parangtritis sekaligus staf honorer Kalurahan Parangtritis, informan memberikan pendapatnya dengan jelas.

Dari data diatas, dapat dilihat para informan terdiri dari berbagai latar belakang jabatan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Seperti dari Dinas Pariwisata Bantul, Ketua Pokdarwis dan Sekretaris, Retribusi (Sub Koordinasi), dan Masyarakat yang berada di Desa Parangtritis. Para informan ini akan sangat membantu peneliti untuk memperoleh data informasi yang akan menjadi bahan analisis sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Pertama dari Dinas Pariwisata Bantul berjumlah 2 orang, dengan fungsi dan jabatan yang sama, yaitu Fungsional (Aditama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif). Sedangkan informan dari pihak pengelola Pariwisata Pantai Parangtritis bagian Redribusi dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) berjumlah 5 orang, dari masyarakat berjumlah 2 orang, dan tidak kalah pentingnya yaitu lurah Parangtritis 1 orang. Hal ini dilakukan agar penulis mendapatkan informasi yang akurat dalam sebuah penelitian, dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti cukup mendapatkan respon yang positif dari Dinas Pariwisata Bantul, pihak pengelola pariwisata, lurah dan masyarakat, sehingga proses penelitian berjalan dengan lancar.

B. Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis

Analisis data, penulis mengandalkan data yang dikumpulkan dilapangan (tempat penelitian) dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumen yang diperoleh dari instansi pemerintah Kalurahan Parangtritis, pengelolaan wisata Pantai Parangtritis dan masyarakat Kalurahan Parangtritis itu sendiri.

Pengelolaan obyek wisata Pantai Parangtritis berada dibawah wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, namun sejak pemisahan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, pengelolaan obyek wisata Pantai Parangtritis berada dibawah Dinas Pariwisata. Pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk peningkatan kinerja dan menfokuskan kerja satuan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang yang telah ditetapkan.

Seluruh data akan diolah dengan deskriptif kualitatif dan disusun secara sistematis berdasarkan indikator yang ada, yaitu: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis, indikatornya meliputi sebagai berikut: kegiatan yang mendatangkan hasil yang bersifat baru, bermanfaat, dan dapat dimengerti dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis; adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam pengelolaan

pariwisata pantai Parangtritis, peran pemerintah Kalurahan Parangtritis dalam Pengelolaan Pariwisata.

Pariwisata akan baik jika dikelola secara bersama, oleh karena itu dalam pengelolaan pariwisata perlu melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintah, lembaga swasta serta dukungan dari masyarakat. Untuk mengelola pariwisata pemerintah menginisiasi sebuah lembaga untuk terlibat dalam mengelola pariwisata dalam hal ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) inilah yang diidentifikasi sebagai bentuk kolaborasi. Pengelolaan pariwisata, kolaboratif yang baik antara pemerintah dan masyarakat mencakup sejumlah strategi dan prinsip yang efektif. Berikut ini beberapa pengelolaan pariwisata.

a. Kekompakan antar pihak;

Kerja-sama antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Pemerintah harus berperan sebagai pengawas (*Supervision*) dan masyarakat harus berpartisipasi langsung dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat harus dijamin berperan penting dalam pengelolaan destinasi wisata untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

b. Strategi pengelolaan berkelanjutan;

Pengelolaan pariwisata perlu dilaksanakan dengan menggunakan strategi berkelanjutan. Artinya pengelolaan harus mampu memberikan manfaat yang adil kepada pemangku kepentingan dan

tidak mengurangi kebutuhan generasi mendatang. Tata kelola pariwisata berkelanjutan memerlukan pendekatan global dan terpadu.

c. Pengembangan sumber daya manusia (SDM);

Penguatan sumber daya manusia merupakan kunci penting pengelolaan pariwisata yang baik. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas pengalaman pariwisata dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pariwisata masyarakat.

d. Promosi dan pemasaran;

Beriklan melalui jejaring sosial dan strategi pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan minat wisatawan dan meningkatkan pendapatan pariwisata di daerah tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti beriklan melalui jejaring sosial, acara pariwisata, dan lain-lain.

e. Pengembangan fasilitas;

Mengembangkan fasilitas pariwisata yang baik memerlukan perencanaan yang detail dan pelaksanaan yang efektif. Fasilitas yang tersedia harus memenuhi kebutuhan pariwisata dan menciptakan kondisi untuk pembangunan berkelanjutan.

f. Manajemen Pembangunan;

Manajemen pembangunan untuk menjamin manfaat yang optimal harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu.

Hal ini melibatkan kolaborasi antara masyarakat, pemangku

kepentingan pariwisata, dan pemerintah untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

g. Kerjasama dengan organisasi pariwisata;

Untuk mengembangkan pariwisata, kolaborasi atau kemitraan harus dilakukan melalui pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada termasuk pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengalaman wisata dan meningkatkan pendapatan pariwisata di wilayah tersebut.

h. Pengembangan sumber daya alam;

Pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat penting dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini melibatkan pengelolaan lingkungan, air, dan sumber daya lainnya yang baik untuk menjamin keberlanjutan pariwisata.

i. Pengembangan masyarakat;

Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan sangat penting dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan mengikuti strategi ini, pengelolaan pariwisata yang efektif melalui kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas pengalaman wisata, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan pariwisata. Bab ini juga akan menjelaskan dengan memakai lima proses Aansel dkk, 2017. 1) Dialog Tatap Muka, 2) Membangun Kepercayaan, 3) Komitmen Terhadap Proses, 4) Saling Memahami, 5) Hasil Akhir Yang Dicapai. Ke-lima proses inilah yang menjadi dasar untuk menganalisis pembahasan pada bab ini dan akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dialog Tatap Muka

Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*) Selama kolaborasi, dialog tatap muka merupakan bentuk komunikasi penting yang menggunakan pesan untuk mencapai makna bersama antara setidaknya dua orang atau lebih dalam situasi di mana pembicara dan pendengar memiliki kesempatan yang sama. Dialog langsung terjadi ketika ada saling melengkapi antara pihak-pihak terkait. Proses tatap muka ini penting untuk membangun kepercayaan, saling menghormati, saling pengertian, dan partisipasi dalam proses tersebut. Dialog langsung diperlukan dalam forum bersama di mana seluruh pemangku kepentingan dapat bertemu langsung untuk memastikan saling pengertian dan menghindari kesalahpahaman. Dialog langsung atau komunikasi dua arah antar lembaga, organisasi dan pemangku kepentingan merupakan keputusan bersama dan tanggung jawab bersama untuk mencapai kerjasama atau kolaborasi melalui pertemuan dan diskusi untuk mencapai konsensus.

Semua pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dialog tatap muka (*Face to face dialogue*) dalam, Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis, dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam hal pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis. Kolaborasi dalam melakukan proses dialog tatap muka sangat memerlukan komunikasi yang efektif apabila semua pemangku kepentingan dapat bertemu langsung sehingga tidak terjadi suatu kesalahpahaman maupun kurangnya pemahaman bersama.

Berikut penjelasan proses dialog tatap muka akan dijelaskan oleh pihak-pihak terkait dengan collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata pantai parangtritis

Hasil wawancara dengan Dinas Pariwsata Bantul, Setia Ardana mengatakan bahwa :

”Didalam *Collaborative Governance* pasti ada yang namanya kerja sama, dan dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis kita berupaya semaksimal mungkin melakukan kerja sama. Didalam pengelolaan kita sudah melakukan dialog tatap muka. Dialog tatap muka ini terjadi disaat kita melakukan sosialisasi, ini dilakukan antara pihak dinas pariwisata bantul, kelompok sadar wisata pokdarwis, dan masyarakat. Saya rasa dialog tatap muka antar organisasi yang saya jelaskan diatas sudah terjadi dengan benar dan apa adanya ”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Dilanjutkan wawancara dengan Y. Apriani masih dengan instansi yang sama Dinas Pariwisata Bantul, memaparkan sebagai berikut :

“Saya sependapat dengan bapak Setia Ardana, yang menjelaskan bahwa sudah melakukan dialog tatap muka dari segi apapun tanpa terkecuali pengelolaan pariwisata pantai parangtritis. Dipengelolaan pariwisata sudah pasti adanya terjadi collaborasi dan salah satu contohnya dialog tatap muka”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Diperkuat dengan penjelasan Lurah Parangtritis Bapak Topo :

“Pandangan saya sebagai lurah terkait pengelolaan pariwisata di Parangtritis ini sudah cukup terjalin terutama dengan poin dialog tatap muka. Kita terlibat secara langsung dalam tahapan ini, punya pemahaman bersama, adanya komitmen dan proses, dan menurut saya yang tidak kalah penting adalah hasil sementara dalam pengelolaan, dengan ini kita punya bahan evaluasi. Proses dialog tatap muka pastinya ada, contoh saja seperti pertemuan berbagai pihak yang dilakukan oleh dinas pariwisata bantul, pokdarwis, dan masyarakat, komunikasi langsung, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan komitmen. Tantangan yang kita hadapi tentunya ada seperti perbedaan pandangan, kualitas sumber daya manusia, penyampaian informasi yang kurang jelas”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Penjelasan diatas dapat disimpulkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata terlibat dalam dialog tatap muka (Face to Face Dialogue) sebagai tahapan pertama dalam proses collaborative governance.

Berikut adalah cara mereka terlibat dalam dialog tatap muka: Keterlibatan Secara Langsung; pihak-pihak terkait terlibat secara langsung dalam proses dialog, yang berarti mereka hadir secara fisik dan berperan aktif dalam pembuatan setiap keputusan terkait dengan kepentingan bersama. Dialog tatap muka ini penting untuk mengidentifikasi peluang yang saling menguntungkan dalam sebuah kolaborasi dan membangun kolaborasi efektif untuk mencapai konsensus bersama. Pemahaman Bersama ; dalam dialog tatap muka, pihak-pihak terkait berusaha membangun pemahaman bersama tentang visi, tujuan, dan strategi yang akan dijalankan. Mereka

menyatukan visi dan tujuan kemudian mewujudkannya secara bersama-sama. Proses ini penting untuk mencapai kesepakatan dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Komitmen pada Proses; selama dialog tatap muka, pihak-pihak terkait juga berkomitmen pada proses kolaborasi. Komitmen ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak tetap terlibat dan berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Komitmen ini membantu dalam membangun kepercayaan antar pihak dan mengurangi perbedaan pandangan yang mungkin timbul. Hasil Sementara (Intermediate Outcomes); setelah melalui tahapan dialog tatap muka, proses kolaborasi berlanjut dengan pembentukan hasil sementara yang dapat diukur. Hasil ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan proses kolaborasi dan memberikan umpan balik untuk perbaikan selanjutnya.

Dengan demikian, dialog tatap muka merupakan tahapan penting dalam collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata, di mana pihak-pihak terkait berkomunikasi langsung, membangun pemahaman bersama, dan berkomitmen pada proses kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama.

Proses dialog tatap muka dalam collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata melibatkan berbagai tahapan dan tantangan. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana keseluruhan proses dialog tatap muka berlangsung dan tantangan yang dihadapi. Proses dialog tatap muka, Pertemuan Berbagai Pihak: dialog tatap muka dimulai dengan pertemuan berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan pariwisata. Pertemuan ini

bertujuan untuk membahas dan mencapai konsensus tentang visi, tujuan, dan strategi yang akan dijalankan dalam pengelolaan pariwisata. Komunikasi Langsung; Komunikasi langsung (face to face) merupakan salah satu upaya yang penting dalam kolaborasi. Komunikasi ini memungkinkan partisipasi aktif dan interaksi langsung antar pihak yang terlibat. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi peluang yang saling menguntungkan dan membangun kolaborasi efektif untuk mencapai konsensus bersama. Membangun Kepercayaan; Proses dialog tatap muka juga melibatkan pembangunan kepercayaan antar pihak yang terlibat. Kepercayaan ini penting untuk meminimalisir antagonisme dan disrespect antar stakeholder. Kepercayaan ini dibangun melalui komunikasi intens dan koordinasi yang baik antar pihak. Pemahaman Bersama dan Komitmen; selama dialog tatap muka, semua pihak berusaha membangun pemahaman bersama tentang visi dan tujuan yang akan dijalankan. Mereka juga berkomitmen pada proses kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Komitmen ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak tetap terlibat dan berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Tantangan dan hambatan dalam *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis yaitu, Perbedaan Pandangan; Perbedaan pandangan antar stakeholder sering kali terjadi dalam dialog tatap muka. Masing-masing pihak ingin memperkuat stereotype mereka, yang dapat menyebabkan perbedaan pandangan yang signifikan. Hal ini membutuhkan waktu dan usaha untuk mencapai konsensus. Kualitas

Sumber Daya Manusia; Kualitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang perlindungan anak atau pariwisata masih terbatas. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas dan efektivitas proses kolaborasi. Penyampaian Informasi; Penyampaian informasi yang kurang optimal juga merupakan tantangan dalam proses kolaborasi. Informasi yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memperlambat proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, proses dialog tatap muka dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis merupakan tahapan penting yang melibatkan berbagai pihak yang terkait sudah dilaksanakan dengan baik namun, proses ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan pandangan, kualitas sumber daya manusia, dan penyampaian informasi yang kurang optimal.

b. Membangun Kepercayaan

Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), keberhasilan *Collaborative governance* salah satu yaitu adanya saling percaya antar aktor, yang dilandasi hubungan profesional atau sosial dengan keyakinan bahwa aktor mempercayakan informasi atau aktor lain dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan.

Bagi organisasi pemerintah, faktor ini penting karena mereka harus yakin bahwa mereka dapat mempercayai mitra lain (rekan jaringan) di dalam pemerintahan (departemen, cabang, kantor, lembaga, dll) di

pemerintah daerah, misalnya) dan mitra di luar pemerintah untuk bekerja sama. kegiatan telah disepakati. Kepercayaan antar pihak dapat menjadi sumber modal yang penting untuk mengatasi perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan kemitraan kelembagaan yang partisipatif. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui upaya masing-masing pihak dalam membangun rasa saling percaya dan bekerja-sama dengan pemerintah dalam *Collabratitive Governace* Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Paringtritis sehingga dapat terjalin tata kelola yang kolaboratif antar pemangku kepentingan tersebut.

Wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Bantul, Y. Apriani mengungkapkan bahwa :

“Membangun kepercayaan atau saling mempercayai adalah salah cara kita melakukan kerjasama dalam pengelolaan, dan bentuk kepercayaan kita dinas pariwisata bantul dengan memberikan servis yang maksimal kepada wisatawan. Dengan itu wisatawan bisa balik kembali dengan kesan yang luar biasa. Contoh servis nya serta, pembaruan citra dan kepercayaan, dalam mengembalikan kepercayaan industri pariwisata yang terpengaruh oleh krisis, pihak pengelola harus melakukan pemulihan dan pembaruan reputasi. Kualitas Jasa: kualitas jasa yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, seperti jasa perjalanan wisata dan pengelola destinasi wisata, sangat penting dalam membangun kepercayaan. Wisatawan yang merasa puas dengan jasa yang diberikan akan lebih cenderung untuk kembali berkunjung dan memperkenalkannya kepada orang lain. Dengan demikian, kepercayaan antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata dapat dibangun melalui pelayanan yang memuaskan, koordinasi yang efektif, pembaruan citra dan kepercayaan, serta kualitas jasa yang diberikan”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Dilanjutkan wawancara dengan Ketua Pokdarwis Tri Waldiyana, mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

“Saya sebagai Ketua Pokdarwis merasa kalau instansi antara dinas pariwisata bantul, pokdarwis, masyarakat dan swasta sudah menjalin relasi yang cukup baik,ya seperti contoh saling mempercayai dibidang kerja kita dalam pengelolaan pariwisata bantul. Kepercayaan antara pihak-pihak terkait dibangun dalam konteks pengelolaan pariwisata melalui beberapa strategi dan upaya yang kita dilakukan. Saya berikan beberapa contoh: misalnya Pengelolaan Pelayanan, pelayanan yang memuaskan dan efektif dapat membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak terkait. Pihak pengelola harus mampu memberikan kepuasan kepada pengunjung, sehingga mereka akan bercerita dan memperkenalkannya kepada orang lain, serta kembali berkunjung. Koordinasi dan Kerjasama, Koordinasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat, sangat penting dalam membangun kepercayaan. Kerjasama yang baik dapat membantu meningkatkan kepercayaan melalui komunikasi aktif dan sinergi dalam pengelolaan pariwisata. Kita sebagai pihak terkait membangun beberapa strategi yaitu, transparansi, komunikasi yang efektif, partisipasi aktif, komitmen dan konsisten, membangun hubungan personal, mengelola konflik dengan baik, memperjelas tujuan dan peran, menghargai keberagaman, evaluasi dan feedback berkala”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Penjelasan diatas dapat disimpulkan dengan membangun kepercayaan dalam *collaborative gacernance* dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, kepercayaan antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata melalui collaborative governance dapat dibangun dan dipertahankan. Mengukur tingkat kepercayaan yang telah dibentuk oleh pihak pengelolaan pariwisata adalah langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas kerjasama dan kolaborasi di antara pihak-pihak terkait. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kepercayaan: Evaluasi partisipasi, tinjau tingkat partisipasi dari setiap pihak terkait dalam kegiatan dan proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata. Partisipasi yang aktif seringkali menjadi indikator penting dari tingkat kepercayaan yang dibangun. Evaluasi apakah partisipasi ini dilakukan

secara konsisten dan apakah semua pihak terlibat merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Evaluasi Secara Berkala: lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur perubahan dalam tingkat kepercayaan dari waktu ke waktu. Ini membantu untuk mengidentifikasi tren positif atau masalah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan diatas,dapat mengembangkan gambaran yang komprehensif tentang tingkat kepercayaan yang telah terbangun di antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan kolaborasi, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta memastikan bahwa semua pihak merasa terlibat dan berkontribusi secara positif.

Untuk mengukur tingkat kepercayaan yang telah dibentuk dalam pengelolaan pariwisata, berikut adalah beberapa metode dan indikator yang dapat digunakan: Indikator Kepuasan Wisatawan: indikator ini melibatkan survei atau wawancara dengan wisatawan untuk mengetahui sejauh mana mereka merasa puas dengan pengalaman wisata mereka. Indikator ini dapat mencakup aspek seperti kualitas fasilitas, pelayanan, dan keamanan. Tingkat kepuasan yang tinggi menunjukkan tingkat kepercayaan yang baik antara pengunjung dan pengelola pariwisata. Dengan menggunakan metode dan indikator ini, tingkat kepercayaan yang telah dibentuk dalam pengelolaan pariwisata dapat diukur dan ditingkatkan.

Kepercayaan antara pihak-pihak terkait dalam konteks collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata dapat dibangun melalui beberapa strategi berikut: Transparansi; setiap pihak harus terbuka dalam berbagi informasi terkait keputusan, data, dan proses kerja. Transparansi membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan. Komunikasi yang Efektif; komunikasi yang rutin dan terbuka antara semua pihak adalah kunci. Ini dapat dilakukan melalui rapat berkala, forum diskusi, atau platform komunikasi digital. Partisipasi Aktif; melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan. Memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan. Komitmen dan Konsistensi; menunjukkan komitmen yang kuat dan konsistensi dalam tindakan dapat membangun kepercayaan. Pihak-pihak harus menepati janji dan menunjukkan integritas dalam setiap tindakan. Membangun Hubungan Personal; interaksi informal dan membangun hubungan personal antar anggota dapat membantu memperkuat kepercayaan. Ini bisa melalui kegiatan bersama di luar konteks kerja formal. Mengelola Konflik dengan Baik; konflik yang muncul harus ditangani dengan cepat dan adil. Proses mediasi atau penyelesaian masalah yang jelas dapat mencegah konflik berkepanjangan yang merusak kepercayaan. Memperjelas Tujuan dan Peran; memastikan semua pihak memahami tujuan bersama dan peran masing-masing dapat menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan. Menghargai Keberagaman; mengakui dan menghargai perbedaan pendapat, latar

belakang, dan kepentingan dari setiap pihak dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Evaluasi dan Feedback Berkala; melakukan evaluasi berkala terhadap kolaborasi yang berlangsung dan memberikan feedback yang konstruktif dapat membantu memperbaiki proses dan memperkuat hubungan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, kepercayaan antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata melalui collaborative governance dapat dibangun dan dipertahankan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membangun kepercayaan sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak.

c. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen Terhadap Proses (*Comitment To Process*), komitmen adalah kesepakatan untuk melakukan suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama, setiap pemangku kepentingan harus proaktif terhadap tugas-tugas tertentu. Setiap mitra mengetahui tentang usaha yang menjadi bagianya dan merupakan bertanggung jawab atas penugasan tersebut.

Commitment to process dapat dicapai melalui saling pengakuan (mutual recognition of interdependance), kepemilikan terhadap proses (shared ownership of process), dan keuntungan yang didapat melalui proses kolaborasi (openness to exploring mutual gain). Dinas Pariwisata Bantul

sudah melakukan komitmen. Dimana Dinas Pariwisata Bantul melakukan pengelolaan terhadap pariwisata Pantai Parangtritis

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah melakukan pengelolaan yang efektif terhadap Parangtritis sebagai objek wisata alam di Kabupaten Bantul. Berikut beberapa tindakan manajemen: Penyelenggaraan kegiatan pariwisata; Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah mengeluarkan sejumlah surat edaran terkait penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti “Surat Edaran tentang penyelenggaraan kegiatan pariwisata”. Meningkatkan kualitas kegiatan pariwisata. industri kuliner lokal dan meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Parangtritis.

Pengelolaan Sampah; Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyelenggarakan kursus pelatihan terbuka tentang pengelolaan sampah bagi masyarakat setempat di Pantai Parangtritis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya pengelolaan sampah yang efektif.

Kerjasama dengan Pokdarwis; Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Pokdariwis (Kelompok Sadar Wisata) untuk meningkatkan kualitas industri kuliner lokal dan meningkatkan minat wisatawan saat berkunjung ke Parangtritis. Pokdarwis juga membantu menciptakan berbagai event/kegiatan komersial untuk mengembangkan atraksi guna merangsang minat wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Parangtritis.

Mengembangkan kemitraan dengan organisasi lain; Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menggandeng Paguyuban Payung Wisata Pantai Parangtritis, Dinas KUKMPP, Polsek Kretek dan Koramil Kretek untuk meningkatkan kualitas kuliner daerah. industri dan meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Parangtritis.

Pengelolaan Fasilitas; Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah mengeluarkan tarif tiket kawasan hiburan dan sarana hiburan untuk tahun 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata di Parangtritis.

Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata, industri kuliner lokal, meningkatkan minat wisata dan meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata di Parangtritis.

Wawancara dengan Dinas Pariwisata Bantul Setia Ardana, menjelaskan pendapatnya sebagai berikut :

"Komitmen itu harus ada, karna kita punya paguyuban ada pokdarwis, jadi komitmen nya itu kita bukan saling menguntungkan tapi saling membutuhkan dan dibutuhkan. Dan upaya konkret yang dilakukan untuk meningkatkan komitmen dari semua pihak terkait yaitu dengan adanya pengembangan program kkbpk kelompok kegiatan program membantu dalam mengatasi perbedaan komitmen dengan membangun kesepahaman dan kesepakatan yang lebih baik. Program ini meliputi pengembangan potensi pariwisata, pengembangan produk wisata, dan pengembangan sistem pengawasan. Untuk mengidentifikasi potensi perbedaan komitmen kita melakukan langkah penting seperti mengidentifikasi perbedaan komitmen Analisis Stakeholder, survei dan konsultasi, analisis persepsi dan ekspektasi, evaluasi keterlibatan historis. Untuk mengatasi perbedaan komitmen ada beberapa hal yang kita lakukan

komunikasi terbuka dan berkesinambungan, diskusi kolaboratif, negosiasi dan kompromi, pembentukan kesepakatan bersama, pengelolaan konflik, penguatan komitmen melalui edukasi dan pelatihan . Ini lah yang kita lakukan dalam mencapai komitmen yang terproses dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Parangtritis”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Selanjutnya wawancara dengan Ketua Pokdarwis Tri Waldiyana, menjelaskan beliau sebagai berikut :

“Terkait adanya pengelolaan pariwisata pantai parangtritis tentu kita tidak lepas dari berbagai tantangan. Komitmen itu sendiri salah satu tantangannya, untuk kita sebagai sebagian dari pengelola menerapkan kerja konsisten dalam kebijakan, pemerintah pusat dan daerah harus membangun harmoni secara konsisten dalam setiap kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan di sejumlah pembanguna, termasud sektor pariwisata. Hal ini memastikan semua tetap fokus pada proses pembagunan yang telah disepakati bersama. Didalam pengelolaan yang kita lakukan, kita mempunyai tingkatan-tingkat dalam pengelolaan di parangtritis ini seperti contoh; kepentingan dan tujuan bersama, kepentingan dan tujuan bersama, struktur dan mekanisme kerja, sumber daya dan kapasitas, dukungan dari pemerintah dan kebijakan, Keterlibatan masyarakat dan stakeholders”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Tingkat komitmen pihak-pihak terkait terhadap proses collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, antara lain: Kepentingan dan Tujuan Bersama; semakin kuat kesamaan kepentingan dan tujuan antara pihak-pihak terkait, semakin tinggi komitmen mereka terhadap collaborative governance. Jika semua pihak memiliki visi yang sama tentang manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan terintegrasi, komitmen mereka cenderung lebih kuat. Kepentingan dan Tujuan Bersama; tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat sangat mempengaruhi komitmen mereka. Hubungan yang baik dan saling percaya dapat

mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi yang lebih baik. Struktur dan Mekanisme Kerja; keberadaan struktur dan mekanisme kerja yang jelas dan transparan dalam proses collaborative governance dapat meningkatkan komitmen pihak-pihak terkait. Ini termasuk aturan main, pembagian peran, dan tanggung jawab yang jelas. Sumber Daya dan Kapasitas; ketersediaan sumber daya (finansial, manusia, dan teknis) dan kapasitas dari masing-masing pihak juga mempengaruhi komitmen mereka. Pihak yang memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup cenderung lebih berkomitmen untuk berpartisipasi dalam proses kolaboratif. Dukungan dari Pemerintah dan Kebijakan; dukungan dan dorongan dari pemerintah, termasuk kebijakan yang mendukung collaborative governance, dapat meningkatkan komitmen pihak-pihak terkait. Kebijakan yang memfasilitasi partisipasi berbagai pihak dan memberikan insentif bagi kolaborasi dapat menjadi faktor pendorong yang signifikan. Manfaat yang Diperoleh; pihak-pihak cenderung lebih berkomitmen jika mereka melihat manfaat nyata dari partisipasi mereka dalam proses collaborative governance. Manfaat tersebut bisa berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi, pelestarian lingkungan, atau keuntungan sosial lainnya. Keterlibatan Masyarakat dan Stakeholders; keterlibatan aktif masyarakat dan stakeholders dalam pengambilan keputusan dan implementasi program juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan komitmen. Partisipasi yang inklusif dapat memastikan bahwa berbagai kepentingan dan perspektif diakomodasi, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan komitmen bersama. Melalui evaluasi faktor-faktor

tersebut, dapat diukur seberapa tinggi tingkat komitmen pihak-pihak terkait dalam proses collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata.

Mengidentifikasi dan mengatasi potensi perbedaan komitmen di antara pihak-pihak pengelolaan pariwisata di Parangtritis adalah langkah penting untuk mencapai konsensus dan kolaborasi yang efektif dalam menjaga keberlanjutan pariwisata. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pihak terkait seperti : Mengidentifikasi Perbedaan Komitmen, Analisis Stakeholder; Lakukan analisis mendalam terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata, termasuk masyarakat lokal, pengusaha pariwisata, organisasi lingkungan, pemerintah daerah, dan lain-lain. Identifikasi berbagai kepentingan, nilai-nilai, dan tujuan dari setiap stakeholder. Survei dan Konsultasi; lakukan survei atau konsultasi langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memahami tingkat kesadaran, pemahaman, dan komitmen mereka terhadap pengelolaan pariwisata. Pertanyaan yang relevan bisa mencakup pendapat mereka tentang isu-isu tertentu, keinginan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan dukungan terhadap kebijakan tertentu. Analisis Persepsi dan Ekspektasi; tinjau persepsi dan ekspektasi yang dimiliki oleh setiap pihak terkait terhadap peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan pariwisata. Perbedaan persepsi ini seringkali menjadi sumber konflik atau ketidaksepakatan yang mempengaruhi komitmen. Evaluasi Keterlibatan Historis; tinjau sejarah keterlibatan dan partisipasi dari setiap pihak terkait dalam inisiatif pengelolaan pariwisata sebelumnya.

Identifikasi pola-pola yang mungkin mempengaruhi tingkat komitmen saat ini.

Mengatasi Perbedaan Komitmen,Komunikasi Terbuka dan Berkesinambungan; laksanakan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara semua pihak terkait. Penting untuk menjelaskan tujuan bersama, manfaat kolaborasi, dan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata. Diskusi Kolaboratif ; fasilitasi diskusi kolaboratif untuk mencari titik temu dan memahami perspektif dari berbagai pihak terkait. Diskusi ini harus inklusif dan memungkinkan pihak-pihak untuk saling mendengarkan, bertukar informasi, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. Negosiasi dan Kompromi; dalam kasus perbedaan yang signifikan, pertimbangkan untuk melakukan negosiasi atau mencapai kompromi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak terkait. Ini bisa melibatkan perundingan mengenai prioritas, alokasi sumber daya, atau pendekatan pengelolaan yang berbeda. Pembentukan Kesepakatan Bersama; bekerjasama untuk menyusun kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang mengikat. Kesepakatan ini harus mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pariwisata dan memenuhi harapan serta kebutuhan dari berbagai pihak terlibat. Pengelolaan Konflik; jika terjadi konflik yang tidak dapat dihindari, sediakan mekanisme yang jelas untuk mengelola dan menyelesaikan konflik tersebut secara adil dan transparan. Ini bisa mencakup mediasi pihak ketiga atau prosedur penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya. Penguatan

Komitmen Melalui Edukasi dan Pelatihan; lakukan edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman tentang keberlanjutan pariwisata dan pentingnya komitmen jangka panjang dari semua pihak terlibat.

Dengan mengidentifikasi perbedaan komitmen dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi mereka, pihak-pihak terkait dapat menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak terlibat. Dari penjelasan diatas yang sudah dipaparkan oleh narasumber dan diperjelas oleh penulis bahwa dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis sudah melakukan komitmen terhadap proses dalam tugas dan tanggung jawab mereka.

d. Saling Memahami

Saling Memahami (*Understanding Each Other*) saling memahami (*Understanding Each Other*) dimana suatu kegiatan atau program akan dilaksanakan merupakan modal bersama dan tanggung jawab bersama, untuk mengidentifikasi permasalahan sehingga terjadi kesamaan pemahaman antar kelompok dan menyadari nilai-nilai fundamental yang melandasi kegiatan atau program tersebut kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

Wawancara dengan Ketua Pokdarwis Tri Waldiyana, berpendapat sebagai berikut ;

“Dalam proses saling memahami kita perlu proses memahami dalam collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata melibatkan sejumlah langkah penting yang memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dan bekerja sama menuju tujuan yang sama, komunikasi terbuka, transparan, empati dan penghargaan itu merupakan salah satu elemen kunci dari saling memahami. Untuk meningkatkan pemahaman kita melakukan pertemuan reguler dan forum diskusi, komitmen terhadap transparansi, penyusunan pedoman bersama, pelatihan dan kapasitasi, monitoring dan evaluasi bersama, pendapat saya seperti itu”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Pokdarwis Adi Cahya, mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut:

“Menurut saya saling memahami dalam sebuah visi dan misi pengelolaan harus ada, salah satu contohnya Solidaritas dan Kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan sangat diperlukan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memiliki visi dan misi yang sama dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Saling memahami dalam konteks *collaborative governance*, terutama dalam pengelolaan pariwisata, berarti setiap pemangku kepentingan tidak hanya memahami peran dan perspektif masing-masing tetapi juga mengakui dan menghargai pandangan dan kebutuhan pihak lain. Berikut adalah elemen-elemen kunci dari saling memahami: Komunikasi terbuka dan transparan ; menyediakan platform untuk dialog terbuka di mana semua pemangku kepentingan dapat berbagi pandangan, informasi, dan kekhawatiran mereka. Memastikan transparansi dalam berbagi informasi sehingga semua pihak memiliki akses yang sama terhadap data dan keputusan yang diambil. Empati dan penghargaan; mengembangkan empati dengan berusaha memahami perspektif dan pengalaman pihak lain.

Menghargai kontribusi dan pendapat semua pemangku kepentingan, bahkan jika berbeda dari sudut pandang kita sendiri.

Untuk meningkatkan pemahaman bersama di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata, beberapa mekanisme atau pendekatan yang dapat diterapkan termasuk: Pertemuan Reguler dan Forum Diskusi: Mengadakan pertemuan rutin atau forum diskusi antara pihak-pihak terkait, seperti masyarakat lokal, pengusaha pariwisata, organisasi lingkungan, dan pemerintah daerah. Pertemuan ini memungkinkan untuk berbagi informasi, mendiskusikan isu-isu terkini, serta mengidentifikasi kebutuhan dan harapan bersama. Komitmen Terhadap Transparansi: Memastikan adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan akses informasi yang cukup kepada semua pihak terkait, termasuk data mengenai pengelolaan pariwisata, anggaran yang digunakan, dan evaluasi hasil-hasil yang dicapai. Penyusunan Pedoman Bersama: Mengembangkan pedoman atau kode perilaku bersama yang mengatur interaksi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan pariwisata. Pedoman ini dapat mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan, tata kelola yang baik, dan cara mengatasi konflik potensial. Pelatihan dan Kapasitasi: Mengadakan pelatihan dan kapasitasi bagi pihak-pihak terkait mengenai berbagai aspek pengelolaan pariwisata, termasuk keberlanjutan lingkungan, manajemen risiko, dan komunikasi yang efektif. Hal ini membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara

konstruktif dalam proses kolaborasi. Monitoring dan Evaluasi Bersama: Melakukan monitoring dan evaluasi bersama terhadap implementasi kebijakan dan program pengelolaan pariwisata. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pihak-pihak terkait dapat mengevaluasi dampak kebijakan, memperbaiki strategi yang kurang efektif, dan memastikan bahwa tujuan bersama tercapai.

Penerapan mekanisme ini tidak hanya memperkuat pemahaman bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata, tetapi juga meningkatkan peluang untuk mencapai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan merata manfaatnya bagi semua pihak. Dengan demikian dalam pembahasan tentang Saling Memahami yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata pantai parangtritis dapat disimpulkan sudah dilaksanakan dengan optimal dan proses kesepakatan bersama dengan tujuan yang sama.

e. Hasil Akhir Yang Dicapai

Hasil Akhir Yang Dicapai (*Final Results Achieved*) studi kasus menunjukkan bahwa ketika tujuan dan manfaat kolaborasi relatif jelas dan kolaborasi kemungkinan besar akan berhasil, maka kolaborasi akan lebih mungkin terjadi. Dalam proses ini, hasil antara dipahami sebagai hasil penting dari proses yang menciptakan insentif yang dapat menghasilkan kolaborasi yang sukses, meskipun hasil antara mungkin mewakili hasil yang nyata secara internasional. Siklus yang baik dalam membangun

kepercayaan dan komitmen dapat dipupuk melalui keberhasilan yang menetes ke bawah selama kolaborasi.

Hasil wawancara dengan Dinas Pariwsata Bantul, Setia Ardana mengatakan bahwa :

“Menurut saya Pengelolaan pariwsata Pantai Parangtritis melalui proses collaborative governance telah mencapai beberapa hasil atau pencapaian, antara lain peningkatan keterlibatan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan ifrastuktur dan fasilitas, pengembangan produk pariwsata berkelanjutan, pengaturan dan penegakan peraturan yang lebih efektif”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Selanjutnya wawancara dengan pihak Redribusi, Ketua Koordinasi Rohmat berpendapat sebagai berikut :

“Saya sebagai ketua koordinasi cukup menyampaikan apa saja yang telah saya lihat dilapangan, karna kita bekerja dibawah naungan Dinas Pariwisata Bantul, yang jelas dalam pengelolaan kita sudah bekerjasama semaksimal mungkin dalam visi dan misi yang sama. Hasil akhir yang dicapai tentunya sudah optimal, dimana dalam proses kerja sudah sudah melakukan beberapa indikator kunci untuk mengekur keberhasilan seperti indikator proses, indikator hasil, indikator dampak, dan metode pengukuran”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara oleh pihak Dinas Pariwisata Bantul, bahwa dalam Gollaboratibe Governance Dalam Pengelolaan Pariwsata Pantai Parangtritis sudah mencapai pada tahap hasil akhir yang dicapai cukup memuaskan. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Melalui collaborative governance, masyarakat lokal, stakeholder pariwsata, dan pemerintah daerah dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pantai Parangtritis. Ini membantu memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan

dan diintegrasikan dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta membantu dalam pengelolaan sumber daya alam pantai secara berkelanjutan. Ini termasuk pengelolaan sampah, pelestarian ekosistem laut, dan perlindungan terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas: Dengan adanya kerjasama antara berbagai pihak, pengembangan infrastruktur dan fasilitas di Pantai Parangtritis dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal. Hal ini mencakup penyediaan tempat parkir, toilet umum, dan fasilitas keamanan yang memadai. Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi Lokal: Kolaborasi yang efektif dalam pengelolaan pariwisata juga berpotensi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, masyarakat dapat terlibat dalam industri pariwisata dengan cara yang menguntungkan dan adil. Pengembangan Produk Pariwisata Berkelanjutan: Dengan adanya collaborative governance, dapat didorong pengembangan produk pariwisata yang berkelanjutan dan beragam, seperti tur ekologi, kegiatan budaya, dan produk kerajinan lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya tarik Pantai Parangtritis tetapi juga menciptakan pengalaman berkesan bagi wisatawan. Pengaturan dan Penegakan Peraturan yang Lebih Efektif: Melalui kolaborasi yang baik, dapat diimplementasikan peraturan yang lebih efektif dan penegakan hukum yang lebih baik terkait

dengan pengelolaan pariwisata di Pantai Parangtritis. Ini membantu menjaga keamanan dan ketertiban serta mengurangi potensi konflik antara masyarakat lokal dan pengunjung.

Pendapat masyarakat lokal terkait kerjasama antar pemerintah dalam pengelolaan pariwisata bantul. Berikut wawancara dengan beberapa masyarakat, menurut Kusnanto :

“Pendapat saya terkait pengelolaan yang ada di parangtritis ini sudah cukup baik, pemerintah sudah memberikan servis yang memuaskan wisatawan termasuk saya sebagai masyarakat biasa”. (Wawancara 10 Juni 2024)

Wawancara dengan Gonang selaku masyarakat lokal :

“Saya kira pihak yang berwenang dalam mengelola pariwisata di pantai parangtritis ini sudah melakukan tugasnya dengan baik, karena saya beberapa kali berwisata di pantai parangtritis sudah merasakan hasil kerjasama antar pemerintah. Kita sebagai masyarakat juga ikut membantu meskipun tidak seberapa, ya seperti contoh tidak membuang sampah sembarangan karena kebersihan pantai bukan tanggung jawab dari pemerintah saja tetapi tanggung jawab bersama dan kesadaran diri sendiri sebagai wisatawan”. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Mengukur keberhasilan collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dan berbagai aspek yang harus diperhatikan. Berikut adalah beberapa indikator kunci untuk mengukur keberhasilan tersebut: Indikator Proses; tingkat partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, jumlah dan keberagaman pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tingkat partisipasi aktif dan kontribusi dari berbagai pihak. Kualitas

Komunikasi dan Koordinasi; efektivitas komunikasi antar pemangku kepentingan, frekuensi dan kualitas pertemuan serta dialog yang dilakukan. Keberhasilan dalam Pembentukan Konsensus; tingkat kesepakatan yang dicapai dalam pengambilan keputusan, kemampuan untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat. Transparansi dan Akuntabilitas; tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan, kejelasan tanggung jawab dan akuntabilitas dari setiap pemangku kepentingan. Indikator Hasil, Implementasi Kebijakan dan Program; sejauh mana kebijakan dan program yang disepakati bersama telah diimplementasikan, keefektifan implementasi program dan inisiatif yang telah direncanakan. Peningkatan Kualitas Pariwisata; Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas pariwisata, peningkatan jumlah wisatawan dan kepuasan mereka, keberlanjutan Lingkungan dan Sosial; dampak positif terhadap lingkungan, seperti pelestarian sumber daya alam dan pengurangan polusi, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Inovasi dan Pengembangan Produk Pariwisata; jumlah dan jenis inovasi yang dihasilkan dari kolaborasi, pengembangan produk pariwisata baru yang menarik dan berkelanjutan. Indikator Dampak, keberlanjutan ekonomi; Pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal, peningkatan citra dan reputasi destinasi; perubahan positif dalam citra dan reputasi destinasi pariwisata di mata wisatawan, peningkatan jumlah wisatawan dan durasi tinggal mereka, kepuasan pemangku kepentingan; kepuasan pemangku kepentingan terhadap hasil

dari proses collaborative governance, persepsi pemangku kepentingan terhadap efektivitas dan manfaat kolaborasi. Metode Pengukuran, survei dan wawancara; melakukan survei dan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan feedback mengenai proses dan hasil collaborative governance. Studi Kasus dan evaluasi independen; melakukan studi kasus dan evaluasi independen untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, pemantauan berkelanjutan; mengimplementasikan sistem pemantauan berkelanjutan untuk terus mengevaluasi proses dan hasil collaborative governance dari waktu ke waktu.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, pengelola dapat mengukur keberhasilan *collaborative governance* secara lebih efektif dan memastikan bahwa tujuan bersama dalam pengelolaan pariwisata dapat tercapai.

Banyak pembelajaran dan perbaikan yang dapat diidentifikasi dari hasil yang dicapai melalui collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata. Berikut beberapa poin penting: Pembelajaran, pentingnya partisipasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan; keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting untuk kesuksesan collaborative governance. Partisipasi ini memastikan bahwa semua suara didengar dan kebutuhan setiap kelompok dipertimbangkan. Keberlanjutan sebagai prioritas; fokus pada keberlanjutan lingkungan,

sosial, dan ekonomi merupakan elemen kunci. Pengelolaan pariwisata yang sukses melalui kolaborasi sering kali menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama, menghindari eksplorasi berlebihan sumber daya. Transparansi dan Akuntabilitas; transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang efektif. Pentingnya Komunikasi yang Efektif; komunikasi yang terbuka dan efektif antara pemangku kepentingan membantu mengatasi tantangan dan konflik yang mungkin timbul selama proses kolaborasi. Fleksibilitas dan Adaptabilitas; kemampuan untuk beradaptasi dan merespon perubahan situasi serta kebutuhan yang muncul sangat penting. Pendekatan yang fleksibel membantu mengatasi ketidakpastian dan perubahan dinamika pariwisata. Perbaikan, meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan; pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi. Ini mencakup pemahaman tentang praktik terbaik dalam pariwisata berkelanjutan dan keterampilan dalam pengelolaan proyek. Penguatan Struktur dan Mekanisme Kolaborasi; mengembangkan struktur dan mekanisme yang lebih formal dan terorganisir untuk kolaborasi dapat membantu dalam pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Penilaian Dampak yang Lebih Baik; mengembangkan metode yang lebih baik untuk menilai dampak dari inisiatif kolaboratif, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan

berkelanjutan. Peningkatan akses terhadap informasi dan data; memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi dan data yang relevan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti. Penguatan Kebijakan dan Regulasi; membuat dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi yang mendukung kolaborasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan pariwisata. Fokus pada Inovasi; mendorong inovasi dalam produk dan layanan pariwisata melalui kolaborasi dapat meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan destinasi pariwisata.

Dengan menganalisis hasil dan pembelajaran dari berbagai contoh ini, kita dapat terus mengembangkan dan menyempurnakan pendekatan collaborative governance untuk mencapai pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan efektif. Keseluruhan, collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis telah memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi keberlanjutan lingkungan dan pariwisata, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat lokal dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri pariwisata tersebut.

Hasil akhir yang dicapai dari proses pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan pariwisata, hasil akhir yang dicapai melalui collaborative governance dapat mencakup berbagai pencapaian positif yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah beberapa hasil akhir yang dicapai:

1. Pengembangan Destinasi yang Berkelanjutan; kolaborasi antara

pemerintah, masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata, dan organisasi non-pemerintah dapat menghasilkan strategi pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal. 2. Peningkatan Kualitas Layanan dan Infrastruktur; melalui kerjasama, berbagai pihak dapat berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur pariwisata, seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas wisata lainnya. 3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal; collaborative governance memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha di sektor pariwisata.4. Kebijakan Pariwisata yang Inklusif dan Adaptif; hasil dari tata kelola kolaboratif adalah kebijakan pariwisata yang lebih inklusif dan adaptif, yang mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan serta responsif terhadap perubahan kondisi dan tantangan yang muncul. Hasil-hasil ini dapat meningkatkan daya saing destinasi wisata dan memastikan bahwa pariwisata memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal.

C. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Parangtritis

Collaboration governance dalam pengelolaan pariwisata pantai Parangtritis melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas

lokal, dan organisasi non-pemerintah. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam collaborative governance ini dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Faktor-Faktor yang Mendukung

1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, pengusaha pariwisata, dan organisasi non-pemerintah, sangat penting untuk memastikan bahwa semua suara terdengar dan kepentingan terwakili.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia: SDM yang baik dalam pelaksanaan program program pariwisata dapat menjadi faktor pendukung yang penting. Kualitas SDM meliputi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan para pekerja yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Kualitas SDM yang baik dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pariwisata.
3. Komunikasi Efektif: Adanya saluran komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, termasuk rapat rutin, diskusi terbuka, dan mekanisme feedback, membantu memperkuat kerjasama dan mengurangi kesalahpahaman.
4. Dukungan Pemerintah: Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan, pendanaan, dan sumber daya lainnya dapat memperkuat upaya collaborative governance.

Seperti yang dikatakan oleh pihak Dinas Pariwisata Bantul Setia Ardana, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Kami mewakili pihak pemerintah sangatlah memberikan dukungan sepenuhnya dalam pengelolaan pariwisata pantai parangtritis dan pantai lainnya, kami mendukung sepenuhnya, dan dukungan kami seperti pengembangan Infrastruktur, promosi dan pemasaran, penyediaan informasi dan pendidikan, regulasi dan kebijakan, insentif ekonomi, pengelolaan destinasi wisata,kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pengembangan produk wisata, keamanan dan keselamatan, ini adalah beberapa contoh dukungan kami terhadap pengelolaan pariwisata parangtritis. (Wawancara, 10 Juni 2024)

Dari wawancara diatas dapat simpulkan bahwa dukungan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Beberapa contoh dukungan pemerintah seperti yang sudah disampaikan oleh pihak Dinas Pariwisata Bantul antara lain :

Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah dapat membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas transportasi umum untuk memudahkan akses ke destinasi wisata. Infrastruktur yang baik meningkatkan kenyamanan wisatawan dan mendukung pertumbuhan pariwisata.

Promosi dan Pemasaran: Pemerintah dapat melakukan promosi destinasi wisata baik di dalam maupun luar negeri. Ini bisa dilakukan melalui kampanye iklan, partisipasi dalam pameran pariwisata internasional, dan kerjasama dengan agen perjalanan. Misalnya, kampanye "Wonderful Indonesia" yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia untuk mempromosikan keindahan alam dan budaya Indonesia.

Penyediaan Informasi dan Pendidikan: Pemerintah dapat menyediakan pusat informasi pariwisata, publikasi panduan wisata, dan platform online yang memberikan informasi lengkap tentang destinasi

wisata. Selain itu, pendidikan dan pelatihan bagi pelaku pariwisata juga penting untuk meningkatkan kualitas layanan. Regulasi dan Kebijakan: Pemerintah dapat membuat regulasi yang mendukung pengelolaan pariwisata, seperti peraturan tentang perlindungan lingkungan, standardisasi layanan, dan perlindungan budaya lokal. Regulasi ini membantu menjaga keberlanjutan pariwisata. Incentif Ekonomi: Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata, seperti subsidi, keringanan pajak, dan bantuan keuangan untuk proyek-proyek pariwisata. Ini membantu mendorong investasi dan perkembangan sektor pariwisata. Pengelolaan Destinasi Wisata: Pemerintah dapat terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk pemeliharaan fasilitas, pengelolaan sampah, dan pelestarian alam serta budaya. Contohnya adalah pengelolaan taman nasional dan situs warisan budaya oleh pemerintah. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Pemerintah dapat membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti komunitas lokal, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata mencerminkan kepentingan semua pihak dan berkelanjutan. Pengembangan Produk Wisata: Pemerintah dapat mendukung pengembangan produk wisata baru yang unik dan menarik, seperti ekowisata, wisata budaya, dan wisata kuliner. Ini bisa dilakukan melalui penelitian, pengembangan, dan promosi produk wisata. Keamanan dan Keselamatan: Pemerintah harus memastikan bahwa destinasi wisata aman bagi wisatawan. Ini mencakup penyediaan layanan keamanan,

pengawasan kesehatan, dan kesiapsiagaan bencana. Contoh-contoh tersebut menunjukkan berbagai cara di mana pemerintah dapat mendukung pengelolaan pariwisata untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, dan memastikan keberlanjutan sektor pariwisata.

Dengan mempertimbangkan dan memperkuat faktor-faktor tersebut, collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan lebih efektif dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya faktor-faktor pendukung ini, collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat.

b. Faktor-faktor Yang Menghambat

1. Kepentingan yang Bertentangan: Adanya kepentingan yang berbeda dan terkadang bertentangan di antara pemangku kepentingan dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Bapak Tri Waldiyana, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Di dalam kerjasama pasti ada faktor pendukung dan penghambat, dan faktor yang menghambat dalam proses collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata pantai parangtritis adalah kepentingan yang bertentangan ini adalah faktor umum yang sering terjadi dilapangan. Faktor kepentingan yang bertentangan

merupakan salah satu penghambat signifikan dalam pengelolaan pariwisata. Konflik kepentingan dapat muncul di antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, seperti pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat lokal, wisatawan, dan organisasi non-pemerintah". (Wawancara 10 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan diatas dengan pihak Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) kepentingan yang bertentangan merupakan salah satu penghambat Collaborative Governance dalam pengelolaan pariwisata pantai parangtritis. Mengatasi kepentingan yang bertentangan memerlukan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, di mana semua pemangku kepentingan diajak berdialog dan dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Upaya mediasi dan fasilitasi oleh pihak netral, pengembangan kebijakan yang inklusif, serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan keberhasilan pengelolaan pariwisata.

Dengan memahami dan mengatasi faktor penghambat ini, collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis dapat ditingkatkan, sehingga lebih efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

D. Pembahasan

Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Indonesia, merupakan salah satu destinasi wisata populer yang menarik banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Parangtritis, penerapan konsep *collaborative governance* menjadi sangat relevan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memaksimalkan potensi pariwisata.

Collaborative governance adalah proses di mana berbagai pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Pembahasan mengenai penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Parangtritis: Partisipasi Pemerintah; pemerintah, baik di tingkat lokal maupun pusat, memiliki peran kunci dalam pengelolaan Pantai Parangtritis. Pemerintah dapat memberikan kerangka regulasi, perizinan, dan pengawasan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Inisiatif Sektor Swasta; sektor swasta, termasuk pengusaha hotel, restoran, dan operator tur, dapat berkontribusi dalam menyediakan layanan dan fasilitas yang menarik bagi wisatawan. Mereka juga dapat berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan pariwisata, seperti akomodasi, transportasi, dan atraksi wisata. Keterlibatan Masyarakat Lokal; Masyarakat lokal adalah pemangku kepentingan utama yang harus dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan pariwisata. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pariwisata dapat memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi mereka. Masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat. Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO); NGO dapat berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses collaborative governance. Mereka dapat membantu dalam menyusun program pelatihan bagi masyarakat lokal, melakukan

kampanye kesadaran lingkungan, dan memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan. Faktor Pendukung *Collaborative Governance*; kepercayaan dan komunikasi, membangun kepercayaan dan komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan adalah kunci sukses *collaborative governance*. Forum komunikasi reguler, lokakarya, dan diskusi terbuka dapat membantu menciptakan pemahaman bersama dan mengurangi potensi konflik. Komitmen Bersama, semua pihak harus memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Komitmen ini dapat diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama. Transparansi dan Akuntabilitas; pengelolaan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan antara pemangku kepentingan. Ini mencakup pelaporan yang jelas mengenai penggunaan dana, pelaksanaan program, dan pencapaian tujuan. Contoh Praktik *Collaborative Governance* di Pantai Parangtritis; Pengelolaan Kebersihan dan Lingkungan; pemerintah daerah bersama masyarakat lokal dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitarnya. Program gotong royong untuk membersihkan pantai dan kampanye pengurangan sampah plastik adalah contoh inisiatif yang melibatkan berbagai pihak. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal; melibatkan masyarakat lokal dalam usaha pariwisata seperti penyediaan homestay, kerajinan tangan, dan kuliner lokal. Pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan dari pemerintah atau sektor swasta dapat mendukung inisiatif ini. KesimpulanPenerapan collaborative

governance dalam pengelolaan pariwisata di Pantai Parangtritis dapat menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dan memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui kerjasama yang baik, Pantai Parangtritis dapat terus menjadi destinasi wisata yang menarik dan memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak yang terlibat.

E. Kebaharuan

Penelitian ini tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis telah memberikan beberapa kebaharuan dan temuan yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh kebaharuan dari penelitian-penelitian tersebut:

1. Peran stakeholder dalam pengelolaan pariwisata, penelitian ini menyoroti pentingnya peran stakeholder dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Dinas Pariwisata dan Pokdarwis harus lebih berperan aktif dalam pengembangan pariwisata, serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat lokal untuk meningkatkan pemahaman tentang sadar wisata.
2. Koordinasi dan komunikasi, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antar stakeholder sangat penting dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis. Dinas Pariwisata dan Pokdarwis harus lebih meningkatkan proses kolaborasi dan

melakukan pertemuan rutin untuk memantau pencapaian tujuan dan mengidentifikasi hambatan.

3. Pemberdayaan masyarakat, penelitian ini menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis. Pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan pariwisata, dengan swasta sebagai mitra antara pemerintah dan masyarakat.
4. Inovasi dan evaluasi, penelitian ini menyarankan bahwa Dinas Pariwisata dan Pokdarwis harus selalu berbenah melakukan inovasi-inovasi yang sudah ada dan melakukan evaluasi rutin terkait pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pariwisata.
5. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan, inisiatif hijau, implementasi inisiatif lingkungan seperti program daur ulang, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan air yang efisien. Hotel dan fasilitas wisata bisa menerapkan praktik ramah lingkungan dan mendapatkan sertifikasi keberlanjutan. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan: Program edukasi untuk wisatawan dan masyarakat lokal tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Ini bisa melalui kampanye, workshop, dan papan informasi di lokasi wisata.
6. Transparansi dan akuntabilitas, sistem pelaporan publik, pengembangan sistem pelaporan publik yang memungkinkan semua

- pemangku kepentingan untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana, progres proyek, dan hasil yang dicapai. Audit Sosial: Melibatkan masyarakat dalam proses audit sosial untuk memastikan bahwa proyek-proyek pariwisata dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
7. Pengembangan produk wisata inovatif, ekowisata dan wisata edukatif, mengembangkan produk wisata yang fokus pada edukasi lingkungan dan pelestarian alam. Wisatawan dapat diajak untuk belajar tentang ekosistem pantai, konservasi penyu, atau sejarah dan budaya lokal. Wisata Digital dan Virtual: Menciptakan pengalaman wisata digital seperti tur virtual, augmented reality (AR), dan aplikasi mobile yang memberikan informasi mendalam tentang atraksi wisata.

Kebaharuan dari penelitian ini adalah bahwa mereka menyoroti pentingnya kolaborasi antar stakeholder, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kelembagaan yang jelas, dan inovasi serta evaluasi yang terus-menerus, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas, pengembangan produk wisata inovatif dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pariwisata dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata bekerja sama dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini tentang dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap hasil, saling memahami, dan hasil akhir yang dicapai dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai Parangtritis, sebagai berikut penjelasannya :

Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*), Indikator pertama yaitu dialog tatap muka sudah dilaksanakan dengan baik, yang mana pihak yang saling terlibat walaupun tidak memiliki jadwal tetapi proses dialog tatap muka tetap dalam bentuk musyawarah berjalan oleh masing-masing pihak. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), Indikator kedua yaitu membangun kepercayaan sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak saling percaya satu sama lain berkontribusi dengan keterbukaan informasi. Komitmen Terhadap Proses (*Comitment To Process*), Indikator ketiga yaitu komitmen terhadap proses sudah dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masingmasing pihak, dimana hal ini terjadi karena masing-masing aktor berkesadaran untuk bersinegritas dalam penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis agar dapat teratasi. Saling Memahami (*Understanding Each Other*), indikator keempat yaitu saling memahami sudah dilaksanakan dengan optimal, dimana hal ini tampak membangun part of them satu sama lain. Saling memahami adalah

aspek penting dalam collaborative governance, saling memahami dapat dilihat dari penelitian yang menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan proses yang diikuti. Hasil Akhir Yang Dicapai (*Final Results Achieved*), sedangkan indikator kelima yaitu hasil akhir yang dicapai telah mendapatkan hasil yang cukup optimal dimana dapat dilihat dari pengelolaan pariwisata pantai parangtritis sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hasil akhir yang dicapai dalam collaborative governance dapat dilihat dari penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan baik dan efektif, hasil akhir yang dicapai dapat dilihat dari peningkatan kualitas pariwisata, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

B. Saran

Dalam konteks pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis, penerapan *collaborative governance* dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan bersama. Berikut adalah detail mengenai saran-saran *collaborative governance* untuk pengelolaan pariwisata di Pantai Parangtritis:

1. Keterlibatan multistakeholder, melibatkan semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, komunitas lokal, pengusaha pariwisata, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Setiap stakeholder memiliki

pengetahuan dan perspektif yang berbeda yang dapat berkontribusi pada pengelolaan yang holistik dan berkelanjutan.

2. Forum Diskusi dan konsultasi, rutin mengadakan forum diskusi dan konsultasi untuk membahas isu-isu terkait pengelolaan pantai Parangtritis. Forum ini dapat menjadi wadah untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak dan merumuskan keputusan bersama yang lebih baik.
3. Transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana pariwisata dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasi mengenai rencana pengelolaan, penggunaan anggaran, serta hasil evaluasi harus tersedia untuk publik dan semua stakeholder.
4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai, keselamatan pengunjung, dan praktik pariwisata yang bertanggung jawab. Program edukasi yang melibatkan masyarakat lokal dan pengunjung dapat membantu mengubah perilaku menjadi lebih berkelanjutan.
5. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan, melakukan evaluasi teratur terhadap keberhasilan implementasi strategi pengelolaan dan belajar dari pengalaman untuk terus meningkatkan pendekatan *collaborative governance*. Evaluasi ini harus melibatkan semua stakeholder dan berfungsi sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang mungkin dihadapi saat penelitian tentang collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata Pantai Parangtritis meliputi:

1. Keterbatasan akses informasi, penelitian ini dapat terbatasi oleh ketersediaan data yang terperinci dan relevan mengenai kegiatan pariwisata, kondisi lingkungan, serta partisipasi berbagai pihak dalam proses kolaborasi.
2. Kesulitan dalam memetakan keterlibatan pihak, identifikasi dan pemetaan aktor-aktor yang terlibat dalam proses collaborative governance bisa sulit karena kompleksitas struktur sosial dan kepentingan yang beragam di tingkat lokal.
3. Kesulitan dalam evaluasi efektivitas, menilai sejauh mana kolaborasi berkontribusi pada tujuan-tujuan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, seperti pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, sering kali memerlukan indikator yang jelas dan data yang kuat.
4. Keterbatasan dalam perwakilan stakeholder, tidak semua kelompok masyarakat atau pihak terkait mungkin terwakili dengan baik dalam proses kolaborasi, yang dapat mengurangi legitimasi dan keberlanjutan keputusan yang dihasilkan.
5. Ketergantungan pada keputusan konsensus, proses pengambilan keputusan yang membutuhkan konsensus dari semua pihak terlibat bisa

memperlambat respons terhadap perubahan cepat atau kebutuhan mendesak.

6. Kesulitan dalam menangani dinamika sosial, perubahan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan politik setempat dapat mempengaruhi stabilitas kolaborasi dan kesinambungan implementasi kebijakan.
7. Keterbatasan dalam pengukuran dampak jangka panjang, sulitnya mengukur dan menilai dampak jangka panjang dari praktik collaborative governance terhadap keberlanjutan pariwisata, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hariadi. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Pasir Putih Bira Kabupaten Bulukumba." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Ansell, C. dan Alinson G. 2007. Collaborative governance In Theory And Practive. Journal Of Public Administration. University of California berkeley.
- Ansell, C. dan Alinson, G. 2012. Stewards, Mediator, and Catalyst: Tower A Model Of Collaborative Leadership1, The Inovation Journal. Vol.17 No.1
- Amanulloh, Naeni. (2015). Demokratisasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Azhura, Putri, Adji Suradji Muhammad, and Yudhanto Satyagraha Adiputra. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Limbah Minyak Di Perairan Bitan ." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH- Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3.1 (2022): 588-596.
- Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019, November). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisataan Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati). In *Conference on Public Administration and Society* (Vol. 1, No. 01).
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative governance in tourism: Empirical insights into a community-oriented destination. *Sustainability*, 11(23), 6673.

- Del Rosa, Y. (2019). Pariwisata Sebagai Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Barat (Pendekatan Analisis Location Quotient). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(2), 208-217.
- Falah, Faiqotul. 2012. Kajian Efektivitas Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional Kutai. Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam.
- Gunawan, A., & MARUF, M. F. (2020). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya). *Publika*, 8(2).
- GINTING,M.(2022). Pendekatan Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Hulu, M., Baiquni, M., Fandeli, C., & Wirasanti, N. (2019). Community Participation on Tourism Development in Parangtritis Tourism Area, Bantul Regency. *E-Journal of Tourism*, 6(2), 225-234.
- Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riduwan, (2010). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- imam, Taofik Chaerul. 2017. Relasi Intraorganisasi Pemerintah Kota Batu dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- VANOZA MAHARANI, A. D. I. S. T. Y., Zarkasi, A., & Yusuf, M. (2022). Pengembangan Sarana Dan Prasarana Objek Wisata Secara

Kolaboratif (Studi Pada Danau Depati Iv Di Desa Rantau Kermas Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020

Sumber Lainnya

<https://parangtritis.bantulkab.go.id/first/artikel/2>

<https://travel.detik.com/domestic-destination/d-6670565/fakta-dan-sejarah-pantai-parangtritis-yogyakarta>

<https://travel.detik.com/domestic-destination/d-6670565/fakta-dan-sejarah-pantai-parangtritis-yogyakarta>

https://www.researchgate.net/profile/EdwinMaulana/publication/311081727_BU_KU_DESKRIPSI_PETA_DESA_PARANGTRITIS/links/583d52a708ae3cb63656fe44/BUKUDESKRIPSI-PETA-DESA-PARANGTRITIS.pdf

PANDUAN WAWANCARA

Indentitas Informan

Nama : Setia Ardana

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Fungsional "Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif"

Pertanyaan : Bagaimana pihak dinas pariwisata bantul terlibat melakukan pengelolaan pariwisata pantai parangtritis terkait dialog tatap muka ?

Indentitas Informan

Nama : Y. Apriani

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Fungsional "Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif"

Pertanyaan : Apa saja bentuk komunikasi yang telah dilakukan untuk memastikan terjadinya dialog tatap muka ?

Indentitas Informan

Nama : Topo

Umur : 71 Tahun

Pekerjaan : Lurah Parangtritis

Pertanyaan : Apa saja hasil akhir atau pencapaian yang telah dicapai melalui proses Collaborative Governance ?

Indentitas Informan

Nama : Tri Waldiyana

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Ketua Pokdarwis

Pertanyaan : Bagaimana kepercayaan antara pihak-pihak terkait dibangun dalam konteks pengelolaan pariwisata ?

Indentitas Informan

Nama : Adi Cahya

Umur : 29 Tahun

Pekerjaan : Sekretaris Pokdarwis

Pertanyaan : Bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi potensi perbedaan komitmen diantara pihak-pihak terkait ?

Indentitas Informan

Nama : Rohmat

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Ketua Redtribusi

Pertanyaan : Apas saja mekanisme yang telah diterapkan untuk meningkatkan pemahaman bersama di antara pihak-pihak tersebut ?

Indentitas Informan

Nama : Agus Wintolo

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Sub Koordinator

Pertanyaan : Bagaimana tingkat komitmen pihak-pihak terkait proses pengelolaan pariwisata bantul ?

Indentitas Informan

Nama : Kusnanto

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : PNS

Pertanyaan : Bagaimana pendapat masyarakat terkait pengelolaan yang dilakukan pemerintah terhadap pariwisata pantai parangtritis ?

Indentitas Informan

Nama : Gonang

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Koki Restoran

Pertanyaan : Bagaimana kepuasan masyarakat terkait pengelolaan pariwisata di pantai parangtritis ?

Indentitas Informan

Nama : Fajar Aditia Ramadhan

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Honorer kantor kalurahan Parangtritis sekaligus pemilik Penginapan

Pertanyaan : Apakah ada perlakuan khusus pemerintah terhadap pantai parangtritis terkait pengelolaan yang ada disekitaran pantai parangtritis ?

Daftar Observasi

No	Uraian Pengamat	Ada	Tidak	Keterangan
1	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	V		
2	Redistribusi Pantai Parangtritis	V		
3	Kantor Kalurahan Parangtritis	V		
4	Ketua Pokdarwis Pantai Parangtritis	V		
5	Sekretaris Pokdarwis Pantai Parangtritis	V		
6	Masyarakat	V		

Daftar Dokumentasi



Gambar.1. Dokumentasi Dengan Pihak Dinas Pariwisata Bantul.



Gambar.II. Dokumentasi Dengan Lurah Parangtritis, dan Pokdarwis.



Gambar.III. Dokumentasi Dengan Ketua Redtribusi Pantai Parangtritis.



**Gambar IV. Dokumentasi Dengan Wakil Ketua Redtribusi Pantai
Parangtritis.**